

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2005

DISTRIBUSI BBM

Skema Baru PSO Tengah Dipertimbangkan

JAKARTA (Suara Karya): PT Pertamina (Persero) meminta pemerintah untuk mengubah pola subsidi atau penugasan pemerintah atau *public service obligation* (PSO) untuk distribusi dan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) yang lama dengan pola baru mulai awal tahun depan. Dengan pola baru ini Pertamina tidak lagi mendapatkan *fee* tetapi margin keuntungan sesuai dengan harga minyak.

Dirut Pertamina Widya Purnama mengatakan, dengan pola PSO baru ini, nantinya Pertamina dan pemerintah akan melakukan negosiasi margin yang didapat, bukan lagi dalam bentuk *fee*. "Kita maunya pola baru tersebut sama dengan yang diberikan pemerintah Malaysia terhadap Petronas," katanya.

Pemerintah melalui Badan Pengatur Usaha Hilir (BPH) Migas yang mempunyai tugas untuk mengatur segala bentuk usaha di dalam sektor hilir migas di dalam negeri, kini sedang menyusun formula usulan itu. Menurut Kepala BPH Migas, Tubagus Haryono, BPH Migas telah menyusun beberapa pola baru

PSO yang akan dijalankan Pertamina maupun pemain asing yang nantinya akan masuk dalam sektor hilir migas. "Kita harapkan surat keputusan ini segera dikeluarkan," katanya.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Arie Sumarno menjelaskan, Pertamina sudah harus melepaskan PSO pada bulan November ini. Tetapi PSO tersebut masih harus dilaksanakan sampai dengan akhir tahun ini, Tahun depan, menurut Arie, Pertamina tidak bersedia melaksanakan PSO dengan pola lama. "Pemerintah sudah menetapkan harus menjalankan PSO hingga akhir tahun ini," ujarnya.



"Kita maunya pola baru tersebut sama dengan yang diberikan pemerintah Malaysia terhadap Petronas."

Widya Purnama
Dirut Pertamina

Haryono mengungkapkan, beberapa masukan dari para pemain asing meminta pemerintah hanya memberlakukan PSO sebesar 30 persen dari kebutuhan dalam negeri. Pasalnya, 70 persen telah dipenuhi oleh Pertamina. "30 persen ini, hanya untuk menahan laju impor yang dibutuhkan pemerintah untuk penyediaan BBM di dalam negeri," ucapnya.

Pertamina, menurut Haryono, tetap akan memegang PSO meskipun masa penugasannya telah berakhir pada November mendatang, mengingat Pertamina merupakan ujung tombak pemasaran karena sudah lengkapnya ketersediaan infrastruktur.

Me-nyangkut masukan dari investor migas lainnya Tubagus Haryono mengaku belum memberikan kepastian, karena akan diserahkan keputusannya kepada pemerintah.

"Pemerintah yang menetapkan kebijakannya, kami yang melaksanakannya," ujar dia.

Dikatakannya, untuk pemain baru akan diberikan kewajiban untuk melaksanakan PSO guna memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. Dengan adanya kebijakan ini maka pemain baru tersebut tidak hanya mencari keuntungan saja.

"Pemain yang masuk di Jawa harus mau mengurus BBM di luar Jawa," katanya.

Dia yakin, tahun depan pemain baru akan semakin banyak yang tertarik masuk ke dalam bisnis hilir migas. Pasalnya, secara bertahap pemerintah sudah akan melepas beberapa produk BBM sesuai dengan harga pasar.

"Saat ini saja banyak pemain lokal baru yang sudah menyatakan minatnya," kata dia.

(Rully)

17

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3}

TAHUN 2005

EKONOMI

Paradoks Bonanza Minyak II

Oleh: ADIWARMAN A KARIM

Negara-negara penghasil minyak tiba-tiba menjadi faktor yang sangat diperhitungkan dalam kancah politik-ekonomi dunia karena petro-dollar yang dimilikinya. Saat itu, negara-negara importir neto minyak memang kesulitan, terlebih menghadapi musim dingin yang perlu lebih banyak energi.

Apakah keadaannya seburuk itu bagi negara-negara yang tidak ikut menikmati bonanza minyak? Ternyata tidak. Uang bergerak mengikuti hukum bejana berhubungan, atau dalam istilah ekonomi disebut "Law of One Price". Dalam ekonomi internasional disebut *purchasing power parity*, dan dalam ekonomi keuangan disebut *interest parity*.

Uang petro-dollar yang demikian besar tidak mungkin ditaruh begitu saja di negara-negara penghasil minyak. Besarnya daya beli negara-negara penghasil minyak akan mendorong mereka menggunakan uang itu untuk membelanjakan atau diinvestasikan. Pada periode bonanza minyak itu, impor negara-negara penghasil minyak naik drastis, yang berarti mereka membelanjakan uang itu untuk membeli barang-barang dari luar negeri.

beberapa negara penguasa minyak merasa perlu membeli kapal tanker sendiri, bahkan lebih dari itu karena belum ada perusahaan lokal yang mampu mengeksplorasi minyak, perusahaan-perusahaan asing dari negara-negara yang terpukul akibat kenaikan harga minyak menikmati naiknya harga minyak.

Jadi, meskipun di satu sisi ekonomi negara-negara tersebut terpukul dengan naiknya harga minyak, di sisi lain sektor industri yang berkaitan dengan teknologi minyak dan sektor lain yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan barang-barang konsumen juga tumbuh cepat akibat naiknya permintaan agregat negara-negara penghasil minyak.

Dari aspek investasi juga terjadi arus modal keluar dari negara-negara penghasil minyak yang pada saat itu utamanya ke Amerika Serikat. Dana investor Arab Saudi selama kurun waktu 1970-an sampai dengan 2001 yang diinvestasikan di AS mencapai 700 miliar dollar AS. Pada sektor swasta juga terjadi investasi ke negara-negara Eropa dan Amerika sehingga pada kurun

Menangkap Arus Balik Kapital

Ketika pecah perang Arab-Israel tahun 1973 dan negara-negara penghasil minyak memboikot penjualannya, harga minyak meroket. Periode ini dikenal oil bonanza I, di mana negara-negara penghasil minyak mendapat wind-fall sangat besar akibat naiknya harga minyak. Indonesia termasuk juga karena masih eksportir neto.

waktu muncullah fatwa yang membolehkan menerima bunga dari investasi tersebut asalkan penggunaannya untuk keperluan sosial dan bukan untuk kepentingan investor. Fatwa ini muncul sebagai reaksi atas penolakan investor terhadap bunga atas investasinya. Keadaan ini jugalah yang mendorong salah seorang putra Raja Faisal untuk mendirikan Faisal Islamic Bank.

Inilah paradoks bonanza minyak I. "The wind-fall is too big to be swallowed by the oil exporter countries". Kenaikan aset keuangan yang begitu besar dalam waktu begitu singkat tidak dapat diikuti kenaikan kapasitas negara-negara penghasil minyak untuk menyerapnya. Terjadi arus balik kapital ke luar negeri.

Bila pada saat era bonanza minyak I Indonesia adalah eksportir neto yang ikut mendapat *wind-fall* kenaikan harga minyak, pada bonanza minyak II ini Indonesia adalah importir neto. Kenaikan harga minyak menimbulkan tekanan pada APBN, nilai tukar rupiah pada khususnya dan ekonomi pada umumnya.

Bila harga minyak naik terus, mungkin pemerintah harus merevisi APBN, menaikkan harga BBM, dan Bank Indonesia harus membiarkan rupiah melemah sampai *supporting level* yang diterima pasar.

Tapi, apakah keadaan akan seburuk itu? Tidak, bila kita dapat mengambil pelajaran dari bonanza minyak I. Akan selalu ada arus balik kapital dari negara-negara penghasil minyak, yang untuk kasus Indonesia dengan mempertimbangkan daya serapnya, mungkin kita bisa mengharapkan ada *luberan (spill-over)* dari arus balik tersebut. Uang mengikuti hukum bejana berhubungan.

Tumbuh

Setelah dilanda krisis ekonomi panjang sejak tahun 1997, kawasan Asia Pasifik tumbuh pesat, termasuk Indonesia. Cadangan devisa Jepang naik dari 354 miliar dollar AS (2000) menjadi 844 miliar dollar AS (2004), China dari 168 miliar dollar AS menjadi 609 miliar dollar AS, Taiwan, Korea, dan Singapura juga naik dalam kurun waktu yang sama.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang (*emerging*) jauh di atas pertumbuhan negara-negara maju, bahkan di

atas pertumbuhan rata-rata dunia. Data publikasi IMF menunjukkan pertumbuhan negara-negara maju berkisar 1,5 persen (2002), naik menjadi sedikit di atas 3 persen (2004) dan diperkirakan 3 persen (2006). Sementara negara-negara berkembang pertumbuhan ekonominya mendekati 5 persen (2002), naik menjadi 7 persen (2004) dan diperkirakan 6 persen (2006).

“

Beberapa negara bersiap menangkap arus balik kapital petro-dollar. Menyiapkan regulasi dan instrumen investasinya.

Pada sektor korporasi, kondisi keuangannya juga membaik, rasio utang terhadap ekuitas yang pada tahun 1990 mencapai 68 persen saat ini dapat dikontrol pada level 33 persen secara rata-rata tertimbang di negara-negara Asia. Tingginya rasio dividen yang dibayar terhadap laba (*dividend payout ratio*) juga mengindikasikan membaiknya manajemen keuangan korporasi.

Kebijakan bunga Fed rendah yang diterapkan AS, bahkan terendah selama 45 tahun terakhir, sebesar 1 persen (2003-2004), dan naik 9 kali mencapai 3,75 persen, telah

mendorong meningkatnya likuiditas global sampai 3.500 miliar dollar AS.

Jepang merupakan pemilik terbesar akumulasi cadangan devisa, diikuti berturut-turut Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Jumlah cadangan devisa mereka mencapai 2.000 miliar, lebih dari separuh total cadangan devisa.

Jadi, negara-negara tersebut tidak dalam posisi siap menerima arus balik kapital dari negara-negara penghasil minyak. Padahal, bonanza minyak II ini telah membuat kawasan Timur Tengah menjadi kawasan paling tinggi pertumbuhan aset orang-orang kaya (*high net worth individuals*) dan paling tinggi pertumbuhan jumlah orang kayanya.

Bila bonanza minyak I mendorong berdirinya bank-bank syariah, di antaranya Faisal Islamic Bank, pada bonanza minyak II ini mendorong tumbuhnya instrumen-instrumen investasi syariah. Pada tahun 2003 nilai sukuk (obligasi syariah) yang diterbitkan baru 1,9 miliar dollar AS, tahun 2004 nilainya naik mencapai 6,7 miliar dollar AS.

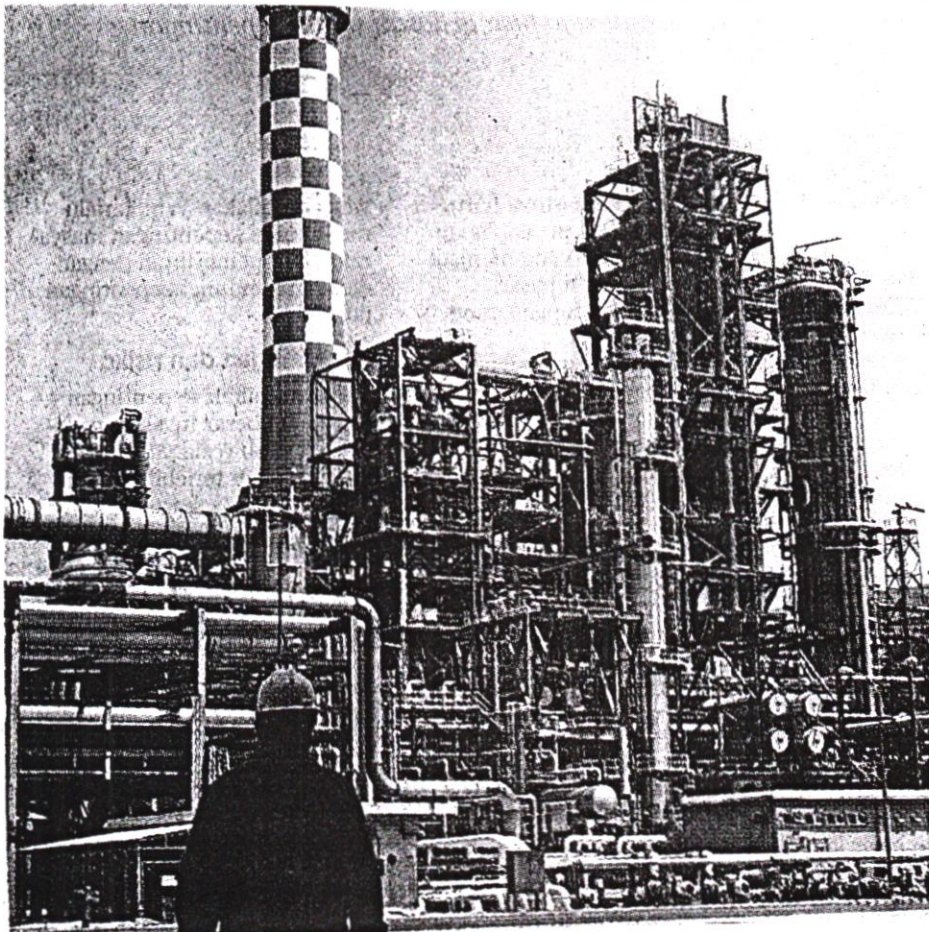
Sayangnya Indonesia belum menerbitkan obligasi syariah dalam dollar AS. Obligasi rupiah pun masih kecil. Biasanya setiap emisi berkisar Rp 200 miliar. Tampaknya hanya ditujukan kepada investor lokal, bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas.

Investasi dalam bentuk saham juga masih kecil daya serapnya untuk investasi sesuai dengan syariah. Masuknya IDB dan beberapa bank syariah Timur Tengah ke Bank Muamalat masih terlalu kecil untuk ukuran negara. Padahal, profitabilitas dan efisiensi operasional bank-bank syariah jauh lebih baik daripada bank konvensional, bahkan dibandingkan dengan bank syariah di luar negeri. *Spread* margin keuntungan (selisih margin pembiayaan dikurangi bagi hasil) atau yang di bank konvensional disebut *interest spread* dari bank-bank syariah lebih tinggi ketimbang bank konvensional.

Beberapa negara bersiap menangkap arus balik kapital petro-dollar. Menyiapkan regulasi dan instrumen investasinya.

Indonesia memang telah memiliki industri keuangan syariah, tetapi itu saja tidak cukup. Perlu kecerdasan bisnis untuk membuatnya menjadi *profitable sharia-compliant business*, bukan sekadar *making business out of sharia-attributes*. Inilah salah satu topik pembahasan "International Islamic Banking Outlook 2006" di Singapura, akhir Agustus ini. Investor Timur Tengah mengatakan, dua syarat bila Indonesia ingin menarik untuk investasi. "We need to have trust in the system and in the people".

ADIWARMAN A KARIM
Direktur Utama Karim
Business Consulting



Seorang pekerja sedang berjalan di pabrik pengilangan minyak Yunani, Aspropyrgos, barat Athena, Yunani, pada Jumat, 12 Agustus 2005. Harga minyak mentah meningkat tajam dan mencapai ketinggian baru pada pekan lalu melampaui 66 dollar AS per barrel.

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23	24	25 26 27 28 29 30 31								
HALAMAN : 1											TAHUN 2005

Mengungkap Penimbunan BBM (Bagian 2)

Perempuan Jadi Umpan

SEORANG perempuan berusia 40-an turun dari tongkang. *Media* yang menyaksikan dari jarak sekitar 100 meter mengagumi kegesitannya. Tampaknya ia sudah biasa naik turun kapal. Kakinya begitu terampil menuruni jeruji besi yang menjadi pembatas sisi luar kapal. Apalagi kapal dalam posisi berjalan.

Dalam hitungan menit, perempuan tersebut sudah berpindah posisi dari tongkang Diasraya III ke perahu kecil (*pompong*) yang mengambil posisi menempel. Seperti halnya bukan hal mudah dilakukan, apalagi untuk kaum ibu seusia dia, melompat sambil membawa satu jeriken berisi penuh bahan bakar, tingkat kesulitannya

cukup tinggi.

Sekalipun berjalan beriringan, posisi *pompong* lebih rendah setengah meter daripada bibir tongkang. Jika sedikit saja keseimbangan perempuan itu terganggu, ia bakal terbentur ke jeruji besi pembatas dan terjengkang ke air.

Sekitar sejam kemudian, seorang perempuan lain yang lebih muda menyusul keluar dari tongkang. Perempuan berkaus merah berperawakan ramping dengan tinggi badan sekitar 150 cm itu menuju bibir tongkang. Berbeda dengan perempuan sebelumnya, kali ini perempuan berkaus merah membawa dua *geleng* (jeriken dengan berat masing-masing sekitar

30 liter).

Sebelum turun, dengan sigapnya ia mengoper 'buah tangan' ke perempuan pertama. Sementara itu, di bagian mesin *pompong*, se-

Begitu kedua perempuan menginjakkan kaki di *pompong*, secepat kilat perahu melesat.

rang pria dalam posisi *standby*. Begitu kedua perempuan menginjakkan kaki mereka di *pompong*, secepat kilat perahu 'melesat' menjauhi tongkang.

Tongkang pun menambah kece-

patan. Permukaan air Sungai Batanghari yang semula tenang pun menjadi beriak. Sampai-sampai, *speed boat* yang berada di sekitar tongkang itu ikut terguncang.

Sore itu, penelusuran dilakukan di sekitar Sungai Batanghari karena mendapat informasi daerah tersebut rawan kebocoran distribusi bahan bakar minyak (BBM). Maklum saja, daerah aliran sungai (DAS) ini memang satu-satunya rute tongkang minyak dari Palembang ke Jambi.

Biasanya tongkang datang dua kali seminggu. Lokasi 'buangan' berkisar antara Kecamatan Muara Sabak dan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Di Jambi, 'kencingan' BBM disebut 'buangan'.

Begitu memperoleh informasi ada tongkang minyak masuk ke Desa Puding, pemburuan segera dilakukan menggunakan *speed boat*. Kurang dari setengah jam menyusuri sungai, di kejauhan terlihat tongkang Diasraya III mengurangi kecepatan untuk meladeni *pompong* yang mendekat.

Hari itu, Sabtu (13/8) pukul 16.30 WIB. Tongkang warna merah berkapasitas 2.200 kiloliter (kl) tersebut sedang ditempel ketat oleh *pompong* yang dinaiki dua perempuan tadi.

19

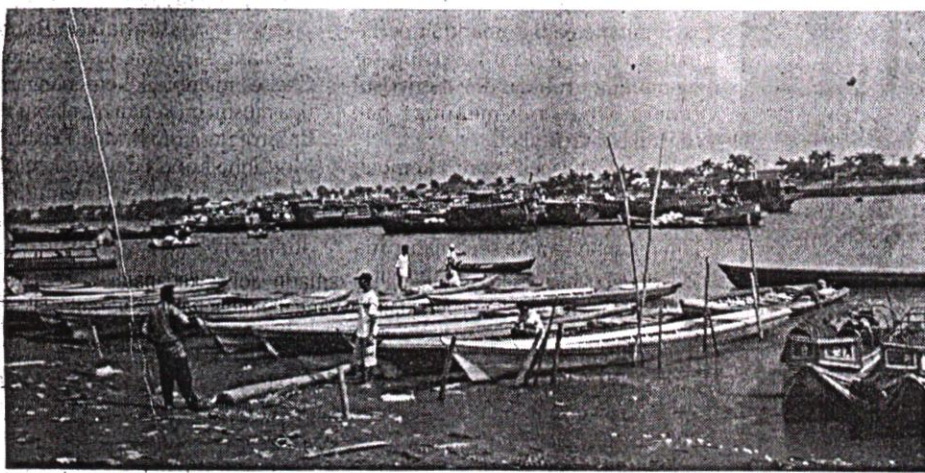
Sambungan Halaman 1

TONGKANG bergerak dari arah Puding menuju Kampung Laut atau biasa disebut dengan 'batas luar'. Tongkang dalam perjalanan pulang ke Palembang. Artinya, Diasraya tidak membawa muatan. Lalu dari mana kedua perempuan bisa mendapat tiga geleng?

DAS terpanjang di Jambi ini memang dikenal sebagai 'ladang' minyak. Selama bertahun-tahun tongkang pembawa solar, premium, dan minyak tanah 'kencing' sepanjang perairan.

Menurut pengakuan warga Puding, mengambil 'buangan' telah menjadi tradisi. Setiap kali tongkang masuk, puluhan *pompong* akan langsung memburu. Tongkang-tongkang itu tak ubahnya intisari bunga yang dirubungi lebah pencari madu.

Dari hasil 'buangan' itulah sebagian penduduk Kecamatan Muara Sabak dan Rantau Rasau mengais rezeki. Bisa dibayangkan, minyak 'buangan' menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk setempat.



■ MEDIA/RAHDHINI

PERAHU kecil bergerombol di tengah sungai saat menjual BBM 'buangan' kepada kapal penadah di Sijenjang, Kasang, Jambi, Senin (15/8). Kapal penadah berdatangan dari kawasan hilir Jambi, seperti Muara Jambi, Nipah Panjang, dan Puding.

Bila berwisata di kawasan sepanjang DAS Batanghari, jangan khawatir kehabisan bahan bakar karena ada puluhan kios penjual BBM. Namun, jangan pula membayangkan kios BBM tersebut seperti di jalur darat. Sama sekali berbeda.

Kios pinggir jalan raya biasanya menjual bensin atau solar dalam botol satu literan atau jeriken lima literan. Di DAS Batanghari dalam bentuk satu drum.

Sebut saja kios milik Thola di Desa Teluk Majelis, Kecamatan Muara Sabak. Di kios berukuran 15 meter persegi yang cukup mencolok karena posisinya menjorok ke tengah laut itu tersedia 15 drum. "Yang lainnya sudah kosong, hanya tinggal ini saja," ujar sang pemilik sambil menunjuk empat drum berisi solar kepada calon pembeli yang memesan solar dalam jumlah besar.

Kendati mempunyai banyak stok, sang pemilik berterus terang tidak mempunyai izin pangkalan. Pria setengah baya berpe-

rawakan pendek itu, Jumat (12/8) malam ditemani anak laki-lakinya yang berusia sekitar 20 tahun. Ia menampik sebagai penadah hasil 'buangan' kapal.

Thola menjelaskan dirinya membeli BBM ke seorang bos yang mempunyai pangkalan. "Kami membeli dari Pak Hasan," ujar pemilik kios yang menghabiskan stok 10 drum dalam seminggu itu. Hanya saja, lanjutnya, sering kali ada orang datang menawarkan stok minyak 'buangan'.

"Kadang juga ada beberapa anggota (aparatus polisi) menawarkan, tapi saya menolaknya. Saya sudah tidak mau lagi. Saya sudah haji sekarang, tidak mau yang begitu-begitu lagi," ujarnya sambil menolak uang muka tanda jadi pembelian solar dari *Media* karena merasa curiga atas gencarnya pertanyaan yang diajukan.

Thola mengakui banyak pemilik kios di kawasan itu yang mendapatkan BBM dari kapal tongkang. Mereka menampung 'buangan' yang diperoleh masyarakat se-

tempat. Kebanyakan yang membeli BBM ke tongkang adalah para ibu.

"Kalau perempuan yang naik ke tongkang, akan diladeni. Walau bawa ayam atau pisang, kapten tongkang langsung ngasih," ujar seorang tokoh masyarakat di Desa Puding. Pengakuan serupa diungkapkan beberapa warga Desa Puding, Rantau Rasau, yang ikut langsung membeli BBM 'buangan'.

Tidur bersama

Seorang perempuan yang biasa disuruh mengambil minyak ke tongkang mengaku dirinya mengetahui dipasang sebagai umpan untuk menarik perhatian kapten atau kru kapal.

"Kadang ada yang minta tidur bersama. Itu makanya orang-orang kapal lebih suka perempuan," ujarnya sambil menyebut nama seorang perempuan dari desa tetangga yang sangat lihai memperoleh minyak.

Di sepanjang Sungai Batanghari lebih se-

puluh lokasi yang menjadi tempat 'buangan' BBM. Sebut saja Kampung Laut, Simbur Naik, Muara Sabak, Teluk Majelis, Dendang, Puding, Simpang Desa, Rawasari, Nipah Panjang, Sungai Aur, Jebus, Lonrang, hingga ke titik terluar Kemingking.

Setiap kali melintasi daerah-daerah tersebut, dipastikan *pompong-pompong* akan mengerumuni tongkang minyak yang lewat. Sabtu (13/8) lalu, Polda Jambi berhasil menangkap Kapal Motor Sandi Dewa 7 yang mengangkut 30 ton solar tadahan.

Menurut Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polda Jambi Ajun Komisaris Besar Polisi Yatim Suyatmo, kapal tersebut kepergok di sekitar Rantau Panjang, Muaro Jambi. Minyak tadahan kapal dijual ke industri.

"Mereka mengumpulkan selama sehari-hari dari banyak *pompong*. Setelah berjumlah 20 sampai 30 ton baru dilepas ke industri setempat," jelas Suyatmo, Kamis (18/8) malam.

Menurutnya, praktik 'buangan' cukup marak di sepanjang Sungai Batanghari. "Buktinya, ya tangkapan kami kemarin. Kalau soal volumenya, ya kami belum jelas."

Itu sebabnya, kata dia lagi, Polda Jambi berniat menertibkan pangkalan liar yang banyak beroperasi di sepanjang DAS. "Kita akan tindak mereka," tegasnya.

Berkaitan dengan maraknya praktik kapal 'kencing', Direktur Polisi Air (Dirpolair) Polda Jambi Ajun Komisaris Besar Hari Sanyoto menuding Pertamina sebagai biang keladinya. Praktik 'kencing' tidak akan terjadi kalau Pertamina tidak melebihi muatan kapal.

Praktik 'kencing' demikian subur di kawasan itu, jelasnya, karena Pertamina menerapkan istilah penyusutan atau *losses*. Toleransi penyusutan itulah yang selama ini dijadikan alasan untuk menutupi kebocoran. "Itu yang saya enggak tahan. Itu kan kebijakan sepihak mereka. Padahal itu bisa terjadi karena ada personel Pertamina yang berlebihan. Itulah cara-cara yang dipakai Pertamina. Kita sedang mengumpulkan bukti untuk menjerat oknum Pertamina itu," tegas Hari di Jambi, Senin (15/8).

Toleransi penyusutan yang diberlakukan Pertamina, menurut Kepala Seksi Rencana dan Operasi Polda Jambi Ajun Komisaris Dadang J yang mendampingi Hari, adalah 0,5% untuk *loading* dari depo Pertamina ke kapal. Selama perjalanan diperhitungkan penyusutan 0,2% dan pengangkutan ke stasiun pengisian bahan bakar (ditoleransi) sebesar 0,5%.

Tentang keberadaan pangkalan liar yang 'menjamur', baik Dirpolair maupun pihak Pertamina menolak bertanggung jawab. Keduanya bahkan saling tunjuk dan saling mengklaim tidak bertanggung jawab.

"Itu bukan wewenang kami, bukan kami yang berhak menindak," ujar Kepala Wira Penjualan Pertamina Depot Jambi Andrian Aditya yang menyindir bahwa polisi yang seharusnya bertindak. (Rdn/HA/CR-37/X-9)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19 20	21 22 23	24	25 26 27 28 29 30 31							
HALAMAN : 7											TAHUN 2005

Stok BBM Nasional Capai 22,1 Hari

JAKARTA – Saat ini, stok bahan bakar minyak (BBM) nasional rata-rata sudah mencapai level normal yakni 22,1 hari. Stok tersebut masing-masing premium 19,7 hari, minyak tanah 23,8 hari, solar 21,4 hari, dan avtur 28,5 hari. “Stok BBM kita sudah aman dan ideal,” jelas Kepala Divisi BBM Pertamina Ahmad Faisal kepada *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (23/8).

Menurut Faisal, pada bulan September Pertamina akan me-

ngimpor produk BBM sebanyak 17,2 juta barel dan impor rutin minyak tanah sekitar 11,429 juta barel. Ini dilakukan untuk mengamankan stok 22 hari. Saat ini, konsumsi BBM nasional juga relatif normal pada kisaran 180 kilo liter (KL) per hari.

Dengan kondisi stok itu, menurut Faisal seharusnya tidak terjadi kelangkaan BBM di beberap daerah. Walaupun terjadi, dia memperkirakan, kemungkinan disebabkan ma-

salah distribusi yang kurang lancar.

Beberapa daerah telah diberitakan mengalami kelangkaan BBM. Di Gowa Sulawesi Selatan, Tegal Jawa Tengah, dan Yogyakarta warga telah antri membeli minyak tanah dan pembelannya dijatah. Akibatnya, harga minyak tanah naik hingga Rp 1.100 hingga 1.200 per liter dari harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp 950 per liter.

Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau juga diberitakan mengalami kelangkaan BBM jenis premium. Para pembeli kendaraan bermotor sampai antri panjang, dan terpaksa membeli premium super jenis pertamax dan pertamax plus. Karena kelangkaan itu, harga premium di tingkat eceran dijual hingga di atas harga Rp 3.000 per liter.

Pasokan Batam

Faisal mengatakan, Senin malam (22/8), Pertamina telah mengirimkan 180 ribu barel premium ke Batam untuk mengatasi kebutuhan di Kepulauan Riau dan Batam. “Kita perkirakan, itu cukup untuk kebutuhan 10 hari,” jelas dia.

Dia mengaku, pasokan BBM ke Batam sempat terlambat hingga dua hari. Penyebabnya, faktor alam berupa gelombang laut yang besar sempat menghambat pengiriman BBM ke wilayah itu, karena ukuran kapal tanker Pertamina relatif kecil. **(lim)**

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA			<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>								
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM							
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23	24 25 26 27 28 29 30							
HALAMAN : 7										TAHUN 2005	

Harga Minyak Tinggi, Sewa Rig Naik 30%

JAKARTA – Akibat tingginya harga minyak, biaya sewa rig darat (*onshore*) untuk kegiatan migas naik sekitar 20–30%. Namun, kenaikan harga ini tidak mengurangi permintaan konsumen.

“Sewa rig yang biasanya sekitar US\$ 38.000 per hari, kini naik menjadi sekitar US\$ 40.000 per hari. Kenaikan sewa ini membantu perbaikan *cash flow* perusahaan jasa pengeboran, seperti kami,” kata Direktur Utama PT Apexindo Pratama Duta Tbk (Apexindo) Hertriono Kartowisastro, belum lama ini di Jakarta.

Menurut Hertriono, saat ini jumlah rig darat lebih banyak diminati ketimbang rig lepas pantai, karena penggunaannya umumnya tidak terikat kontrak jangka panjang, seperti halnya rig lepas pantai. Namun, keberadaan rig jenis ini masih harus berkompetisi dengan masuknya rig asal Cina, yang juga memiliki kontrak jangka pendek. (ari)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31									
HALAMAN : 7											TAHUN 2005

Taiwan Tertarik Investasi di Sektor Migas

JAKARTA – Perusahaan BUMN Taiwan, Chinese Petroleum Corporation (CPC), tertarik berinvestasi pada industri sektor hulu maupun hilir migas di Indonesia. Demikian antara lain hasil pertemuan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dengan rombongan Chinese Petroleum Corporation (CPC) yang dipimpin oleh *Vice President* CPC dan perwakilan CPC Indonesia di Jakarta, Selasa (8/23).

“Kita menyambut dengan baik, karena ada beberapa prospek investasi antara lain pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, pembangunan kilang dan pembangunan pabrik petrokimia,” kata Purnomo di Jakarta, Selasa (23/8).

Pada kesempatan itu, CPC juga mengungkapkan niatnya memperpanjang kontrak pembelian gas alam cair (*liquefied natural gas/LNG*) dari Indonesia karena kebutuhan gas yang terus meningkat. Kontrak pembelian CPC dengan PT Pertamina (Persero) akan berakhir pada tahun 2009. Selama ini, Pertamina menyuplai kebutuhan LNG CPC dari lapangan Bontang di Kalimantan Timur. (lim)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15	16 17 18	19 20	21 22 23	24	25 26 27 28 29 30 31					
HALAMAN : 7											TAHUN 2005

BPH Migas Ambil Alih Proyek Pipanisasi Kaltim-Jawa

JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengambilalih pelaksanaan pembangunan proyek pipanisasi Kalimantan Timur-Jawa, yang semula akan dibangun PGN. Pada pertengahan September mendatang, BPH akan melelang ruas pipa tersebut.

“Dalam rapat dengan Wapres, telah dibentuk tim *taskforce* dan saya diminta menjadi ketuanya. Selanjutnya, saya segera membuat hitung-hitungan supaya (ruas) itu bisa dilelang,” kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono kepada *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (23/8).

Tubagus menyatakan, pelelangan pipa ruas Kaltim-Jateng sepanjang 1.200 kilometer ini dilakukan sesegera mungkin untuk mengurangi biaya subsidi BBM yang semakin membengkak dan mengantisipasi terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di masa mendatang.

Dia mengaku, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah memiliki rencana selama beberapa tahun terakhir terhadap ruas tersebut, bahkan telah melakukan studi kelayakan (*feasibility study*). Hanya saja, ia berharap, semua pihak bisa mengesampingkan berbagai kepentingan. “Pemerintah punya keinginan untuk segera mengantisipasi kelangkaan BBM di masa depan. Lagipula studinya kan belum selesai,” jelasnya.

Namun, kata Tubagus, pihaknya selalu

berkoordinasi dengan PGN, juga pihak terkait lainnya seperti PLN, dan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). “Karena yang harus kita perhitungkan secara cermat adalah mengenai keseimbangan antara *supply* dan *demand* gas,” jelasnya.

Proyek ini sesungguhnya merupakan salah satu proyek raksasa yang telah lama direncanakan PGN. Namun, ruas yang direncanakan adalah Kalimantan Timur-Jawa Timur. Dari proyek ini, diharapkan dapat menyalurkan gas sebesar 1.000 juta kaki kubik (*mile-mile standard cubic feet per day/MMSCFD*), dengan panjang 1.100 km dan diameter pipa 42 inci. Pembangunan ruas ini dijadwalkan akan dimulai pada 2006. Pipa ini nantinya akan dilanjutkan hingga ke Jawa Barat dan diintegrasikan dengan pipa jalur Sumsel-Jabar.

Untuk mendukung pelaksanaan proyek tersebut, Bank Pembangunan Asia (ADB) bahkan telah memberikan hibah (*grant*) bagi PGN senilai US\$ 1 juta. Dana yang dialokasikan untuk studi

kelayakan dicairkan pada Februari 2005.

Studi kelayakan tersebut akan menentukan siapa yang bertindak menjadi produsen gas maupun luas pasarnya, baik untuk PGN maupun PLN. Begitu juga, soal pendanaannya, yakni gabungan antara pinjaman dan ekuitas atau alternatif lain.

Investasi yang akan dikeluarkan diperkirakan mencapai US\$ 1,9 miliar. Dana tersebut naik dibandingkan estimasi sebelumnya yang mencapai US\$ 1,7 miliar, dengan harapan agar proyek tersebut setahun lebih cepat dari yang dijadwalkan sebelumnya.

Mengenai pembelokan ruas pipanisasi ini, Tubagus mengatakan, hal itu sudah sesuai dengan rencana induk jaringan transmisi gas bumi nasional. “Dalam rencana itu, pipa ditarik ke Jawa Tengah, bukan Jawa Timur. Supaya mudah nanti bawanya ke Jawa Barat. Kebutuhan gas Jatim nantinya terisi dari Blok Cepu,” kata Tubagus.

Saat dikonfirmasi, Direktur Utama PGN WMP Simandjuntak mengatakan bersedia mengikuti ketentuan pemerintah. Menurut dia, studi kelayakan atau *feasibility study* yang telah dilakukan PGN justru semakin memperkuat posisi tawar PGN. “Kami tetap akan mengikuti proses lelang tersebut. Kami akan maju dengan konsorsium yang terdiri dari PGN, PLN, PKG, IKPT, Triparta, dan lainnya,” jelas Simandjuntak. (c63)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 7											TAHUN 2005																			

Produksi Minyak Non-OPEC Naik 600 Ribu BPH

JAKARTA - Produksi minyak negara non-OPEC pada kuartal keempat tahun 2005 meningkat hingga 600 ribu barel per hari (BPH), menjadi 51 juta BPH. Sebelumnya, produksi negara non-OPEC ini hanya 50,4 juta BPH pada kuartal III tahun 2005.

Tercatat negara-negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) akan menambah produksi menjadi 20,7 juta BPH pada kuartal terakhir tahun ini. Artinya, produksi mereka meningkat hingga 100 ribu BPH dibandingkan produksi saat ini.

Sementara itu, produksi minyak negara-negara Eropa Timur juga meningkat hingga 200 ribu BPH pada kuartal yang sama. Kenaikan ini mencatat angka produksi 5,9 juta BPH.

Berdasarkan laporan, seperti dirilis *opec.com*, kapasitas produksi minyak mentah negara-negara berkembang juga akan meningkat hingga 300 ribu BPH menjadi 12,8 juta BPH pada kuartal terakhir 2005.

OPEC juga memperkirakan, produksi dari negara-negara Amerika Utara bertahan pada posisi 14,3 juta BPH. Sebanyak 11,9 juta BPH disumbangkan oleh Republik Soviet, sementara sisanya, negara-negara Pasifik menyumbangkan 0,5 juta BPH, dan Cina 3,6 juta BPH.

Sebelumnya, Gubernur OPEC Indonesia Maizar Rahman dalam pemaparannya di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, akhir Juli lalu, memprediksikan, produksi minyak mentah non-

OPEC akan meningkat hingga 51 juta BPH, sementara produksi negara-negara OPEC mencapai 30 juta BPH dan OPEC NGL 4,3 juta BPH.

Produksi dunia pada kuartal IV/2005 secara keseluruhan mencapai 85,3 juta BPH. Hanya saja, OPEC memperkirakan permintaan pada kuartal ini pun turut naik hingga 85,9 juta BPH atau naik 2,2 juta BPH dibandingkan kuartal III/2005. Akibatnya, diprediksikan masih terjadi kekurangan pasokan minyak menjelang kuartal IV/2005 sebesar 600 ribu BPH.

Lebih lanjut, Maizar memaparkan, prediksi permintaan minyak mentah dunia pada 2010 mencapai 89,9 juta BPH dan meningkat hingga 111,3 juta BPH pada tahun 2025. "Pertumbuhan permintaan ini dikarenakan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya Cina hingga tahun 2025," tandasnya.

Meski begitu, pertumbuhan konsumsi minyak dunia pada tahun 2005 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2004. Pada tahun ini, pertumbuhan permintaan hanya mencapai 1,8 juta BPH, sedangkan pada tahun 2004 mencapai 2,6 juta BPH.

Peningkatan permintaan sebesar 1,8 juta BPH tersebut didominasi oleh Cina dan negara baru di Asia sebesar 0,97 juta BPH, Amerika Utara 0,33 juta BPH, dan wilayah lainnya mencapai 0,48 juta BPH. (c63)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input checked="" type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23 24	25 26 27 28 29 30 31							
HALAMAN : 4											TAHUN 2005

Minyak Tanah di Tasik dan Sumedang Langka

Sudah 2 Minggu Warga Kesulitan Mendapatkannya

TASIKMALAYA, (PR).-

Akhir-akhir ini warga di Kota/Kab. Tasikmalaya dan Kab. Sumedang cukup kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah. Pasalnya, persediaan minyak tanah yang ada di warung pengecer hingga ke pangkalan kerap kosong. Kelangkaan minyak tanah yang sudah berlangsung dua minggu ini hingga kini belum ada solusinya.

"Sekarang, susah mencari minyak tanah! Biasanya di warung dekat rumah selalu ada, sekarang sering kosongnya. Kalaupun mau dapat, saya harus jalan-jalan dulu mencarinya dari warung ke warung," kata Imas (30) warga Argasari Kota Tasikmalaya.

Keluhan yang sama diungkapkan warga Ampera Kel./Kec. Cipedes dan Kel./Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya. Mereka mengatakan hampir dua minggu terakhir, kesulitan mendapatkan minyak tanah. Padahal sebelumnya mereka mudah membeli di warung sekitar rumahnya. Namun saat ini persediaan minyak tanah di warung sering habis.

Keluhan itu ternyata tidak hanya dirasakan konsumen, namun dirasakan pula pemilik warung yang biasa menjual minyak tanah secara eceran, seperti Budi (20) warga Jln. Ampera Kel./Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya. Menurutnya, sejak dua minggu lalu kiriman minyak tanah dari pemasok sering mengalami keterlambatan. Ia juga heran dengan banyaknya pembeli dari daerah lain yang datang. Padahal, biasanya pembeli hanya warga sekitar.

Begitu juga dengan volumenya, apabila sebelumnya konsumen rata-rata hanya membeli sekira 1 liter saja, saat ini banyak yang membeli lebih dari tiga liter. Akibatnya, ujar Budi, sering kali tidak bisa melayani semua pembeli yang datang. Pasalnya, stok minyak tanah di tempatnya cepat habis.

Hal sama dialami H. Holil pengelola pangkalan di Kampung Kalangsari Kel. Awipari Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya. Menurutnya, saat ini masyarakat yang datang membeli minyak tanah ke tempatnya cukup banyak. Me-

reka datang bukan hanya dari warga setempat saja tetapi dari daerah lain.

Menanggapi hal itu, Kepala Wira Penjualan Pertamina Depot Priangan Timur, Iwan Yudha Wibawa dan Ketua Hiswana Migas DPC Priangan Timur H. E. Rumana menjelaskan bahwa penyebab kelangkaan minyak tanah bukan disebabkan masalah distribusi.

Menurutnya kelangkaan minyak tanah itu terjadi karena melonjaknya pembelian. Hal itu terjadi karena masyarakat mendengar kabar BBM akan naik. Dia menduga hal itulah yang menyebabkan masyarakat membeli minyak tanah secara berlebihan.

Dia mengatakan untuk saat ini, pihaknya belum bisa melakukan penambahan pasokan. Pasalnya pasokan yang saat ini disalurkan untuk melayani kebutuhan masyarakat sudah sesuai dengan kuota yang ditetapkan.

Di Sumedang

Kelangkaan minyak tanah ini juga terjadi di Kab. Sumedang,

khususnya di sejumlah kecamatan di luar kawasan perkotaan. Menurut sejumlah warga yang ditemui "PR" di beberapa kecamatan di luar Sumedang kota, Selasa (23/8), kelangkaan minyak tanah itu mulai dirasakan antara dua minggu hingga sebulan terakhir.

Salah seorang warga di Desa/Kec. Ganeas Edi, serta sejumlah tetangganya, menyebutkan, kelangkaan minyak tanah di wilayah kecamatan tersebut, mulai dirasakan selama dua minggu lalu. Keterangan itu, dibenarkan pengelola dua pangkalan minyak tanah di kota kecamatan tersebut.

Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Sumedang, Drs. H. Ali Badjri, M.M., menyatakan, pihaknya, Selasa (23/8) telah menurunkan satu tim monitoring ke sejumlah pangkalan minyak tanah di kecamatan-kecamatan. Di samping itu, pihaknya telah meminta Hiswanamigas, untuk mempertimbangkan dalam kelangkaan ini mau menambah jatah pengiriman ke pangkalan-pangkalan minyak tanah. (A-116/A-91)***

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 7												TAHUN 2005																		

Stok BBM Nasional Capai 22,1 Hari

JAKARTA – Saat ini, stok bahan bakar minyak (BBM) nasional rata-rata sudah mencapai level normal yakni 22,1 hari. Stok tersebut masing-masing premium 19,7 hari, minyak tanah 23,8 hari, solar 21,4 hari, dan avtur 28,5 hari. “Stok BBM kita sudah aman dan ideal,” jelas Kepala Divisi BBM Pertamina Ahmad Faisal kepada *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (23/8).

Menurut Faisal, pada bulan September Pertamina akan me-

ngimpor produk BBM sebanyak 17,2 juta barel dan impor rutin minyak tanah sekitar 11,429 juta barel. Ini dilakukan untuk mengamankan stok 22 hari. Saat ini, konsumsi BBM nasional juga relatif normal pada kisaran 180 kilo liter (KL) per hari.

Dengan kondisi stok itu, menurut Faisal seharusnya tidak terjadi kelangkaan BBM di beberap daerah. Walaupun terjadi, dia memperkirakan, kemungkinan disebabkan ma-

salah distribusi yang kurang lancar.

Beberapa daerah telah diberitakan mengalami kelangkaan BBM. Di Gowa Sulawesi Selatan, Tegal Jawa Tengah, dan Yogyakarta warga telah antri membeli minyak tanah dan pembelannya dijatah. Akibatnya, harga minyak tanah naik hingga Rp 1.100 hingga 1.200 per liter dari harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp 950 per liter.

Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau juga diberitakan mengalami kelangkaan BBM jenis premium. Para pembeli kendaraan bermotor sampai antri panjang, dan terpaksa membeli premium super jenis pertamax dan pertamax plus. Karena kelangkaan itu, harga premium di tingkat eceran dijual hingga di atas harga Rp 3.000 per liter.

Pasokan Batam

Faisal mengatakan, Senin malam (22/8), Pertamina telah mengirimkan 180 ribu barel premium ke Batam untuk mengatasi kebutuhan di Kepulauan Riau dan Batam. “Kita perkirakan, itu cukup untuk kebutuhan 10 hari,” jelas dia.

Dia mengaku, pasokan BBM ke Batam sempat terlambat hingga dua hari. Penyebabnya, faktor alam berupa gelombang laut yang besar sempat menghambat pengiriman BBM ke wilayah itu, karena ukuran kapal tanker Pertamina relatif kecil. **(lim)**

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 1												TAHUN 2005																		

Daerah produsen migas agar ikut tanggung subsidi

Oleh BAMBANG DWI DJANUARTO
& ERWIN NURDIN
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta daerah penghasil minyak dan gas (migas) dapat bersama-sama berbagi beban didalam menanggung kenaikan belanja subsidi bagi daerah-daerah yang bukan penghasil komoditas itu.

"Kita perlu bersama-sama mencari formula yang tidak melanggar azas keadilan, keseimbangan serta kebersatuan sebagai negara dalam penyempurnaan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH)," ujarnya saat Pidato didepan sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kemarin.

Kebijakan DBH dalam tahun

anggaran 2006 ditujukan untuk mempercepat penetapan alokasi DBH melalui peningkatan kordinasi dan akurasi data. Dalam rangka otonomi khusus, lanjutnya, DBH pertambangan migas untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberikan sampai dengan tahun ke delapan, dan untuk Provinsi Papua sampai dengan tahun ke-25 sebesar 70%.

Sementara untuk kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU), Presiden menyatakan rasio dana perimbangan untuk DAU dalam RAPBN 2006 sebesar 26% dari penerimaan dalam negeri bersih.

"Meningkat dari APBN 2005 yang sebesar 25,5%, alokasi DAU

untuk tiap daerah tidak lebih kecil dari tahun anggaran 2005. Apabila pada 2006 ada provinsi yang menerima DAU lebih kecil dari 2005 maka akan diberikan dana penyesuaian yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan negara."

Presiden menjelaskan kebijakan ini dilakukan hanya dalam masa transisi. Untuk 2008, DAU akan dipergunakan sebagai instrumen perimbangan fiskal antardaerah.

Daerah yang sudah dapat menggali potensi keuangan daerahnya serta memperoleh bagian dari hasil sumber daya alam dan perpajakan, katanya, akan memperoleh DAU lebih kecil.

Dengan demikian, kata dia,

jumlah alokasi DAU bisa meningkat atau menurun serta berbanding terbalik dengan kemampuan fiskal daerahnya dan kebutuhan fiskal masing-masing daerah.

Mekanisme

Kepala Bapekri Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan seharusnya daerah penghasil minyak memahami pernyataan presiden tersebut dan bisa memberikan bagi hasil tersebut melalui berbagai mekanisme.

"Macam-macam caranya. Bisa dibagikan ke daerah, lalu daerah itu membayar sendiri subsidiya. Atau, membayar lalu dibayar dengan bentuk

lain," katanya.

Selain itu, kata Anggito, daerah penghasil migas itu bisa pula berbagi subsidi dengan membayar sebagian dari gaji karyawannya.

Menurut Anggito, mekanisme berbagi beban subsidi itu tidak boleh kaku. Kalau kaku pada aturan sulit dicari dasar hukumnya.

Mengenai pinjaman langsung ke luar negeri, Anggito mengatakan peraturannya akan ke luar tahun ini, dan praktis berlaku tahun depan. Daerah, kata dia, tidak bisa melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Namun, pinjaman luar negeri yang dihibahkan ke daerah sudah ada aturannya, yakni melalui kepu-

tusan menteri keuangan (Kepmenkeu) No. 35/2003 yang sedang direvisi.

Terkait Aceh, Anggito mengatakan nanti tentu akan dilakukan revisi undang-undang mengenai Aceh. "Soal Aceh yang boleh meminjam sendiri maka akan ada revisi UU tentang Aceh. Aceh boleh dengan sesuai MOU," katanya.

Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita mengatakan soal bagi beban subsidi tersebut memang penting dan perlu dilakukan amendemen terhadap UU. Tapi belum tentu dapat digunakan secara baik oleh daerah yang bersangkutan tahun itu. (dwi.djanuarto@bisnis.co.id/erwin.nurdin@bisnis.co.id)

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 <u>24</u> 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : T. 6										TAHUN 2005	

Pasok premium di Batam normal lagi

BATAM: Pasokan bahan bakar jenis premium di Batam sudah mulai normal sejak Senin malam, namun kepanikan warga masih terlihat di semua stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).

Antrian panjang kendaraan bermotor hingga ratusan meter terjadi hampir di seluruh SPBU. Ini terjadi sejak Pertamina Batam Terminal mendistribusikan premium yang baru diterima pada Senin sore.

Nono Asmanu, Kepala Cabang PT Pertamina Batam Terminal, menyebutkan sebanyak 400 kiloliter premium sudah didistribusikan di 11 SPBU.

"Jumlahnya itu untuk memenuhi kebutuhan satu hari, dan kami pastikan untuk satu minggu ini pasokan premium di Batam aman," ujarnya kepada *Bisnis* kemarin.

Sebenarnya tidak ada alasan untuk panik karena pasokan sudah aman dan untuk hari-hari berikutnya tidak ada kelangkaan minyak lagi. (*BISNIS/SUS*)

MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/> 	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 7.6		TAHUN 2005

Unocal jadi Chevron East Kalimantan

Indo Asia Business Unit kelola aset Chevron

Oleh APRIKA R. HERNANDA
Bisnis Indonesia

Yudiana.

JAKARTA: Setelah memperluas ekspansinya dengan mengakuisisi 77,2% saham Unocal, perusahaan migas Amerika Serikat, ChevronTexaco Corporation mulai menata ulang asetnya di Indonesia dan Filipina.

Ganti nama

Chevron sendiri juga berencana mengubah nama dua aset besarnya di Indonesia itu. Unocal akan menjadi Chevron East Kalimantan, sementara nama baru Caltex yang tengah disiapkan adalah Chevron Pacific Indonesia. Perubahan nama itu kini juga tengah diselesaikan di Departemen Kehakiman dan diharapkan dapat difinalisasi sebelum akhir tahun ini.

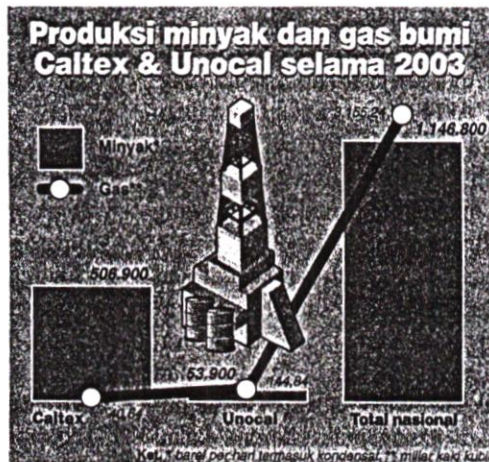
Satu unit usaha, yaitu Indo Asia Business Unit, bakal dibentuk untuk mengelola aset tersebut, termasuk mereorganisasi dua bisnisnya, PT Caltex Pacific Indonesia dan Unocal Indonesia Company.

Presiden Direktur Caltex W. Yudiana Ardiwinata mengatakan pembentukan unit usaha itu kini tengah dalam proses dan diharapkan selesai dalam waktu dua bulan mendatang.

"Dengan adanya merger itu, ada hal-hal yang harus dikoordinasikan. Oleh karena itu dalam waktu dekat akan dibentuk Indo Asia Business Unit sebagai *subsidiaries* ChevronTexaco," katanya kemarin.

Unit usaha baru itu, jelasnya, berada di ChevronTexaco International Exploration & Production (CIEP) dan akan membawahi dua perusahaan yang saat ini masih memegang kontrak bagi hasil dengan pemerintah Indonesia, Caltex dan Unocal.

Dengan pembentukan unit Indo Asia, dua perusahaan ini bakal bertanggung jawab pada anak perusahaan Chevron dan melaporkan kinerjanya di unit baru itu.



Sebelumnya, kata dia, manajemen Caltex melaporkan ke ChevronTexaco di kantor pusatnya di San Ramon, California. Sementara, Unocal melapor ke perusahaan induknya di El Segundo.

"Memang Caltex dan Unocal ini tidak bisa disatukan. Pertama, karena bentuk badannya berbeda, yang satu PT, satunya *company*. Daerah operasinya juga berbeda, ada yang di *onshore* dan *offshore*. Unocal itu kan juga punya LNG," tutur

Yudiana yang juga dipercaya sebagai pejabat sementara dalam struktur manajemen Indo Asia Business Unit mengoptimis perubahan ini akan berpengaruh baik terhadap kinerja dua aset migas Chevron tersebut.

Apalagi, BP Migas dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan sinyal positif. "Kami sudah melaporkan ke BP Migas, tapi memang belum secara detail. Dengan Pak Menteri [ESDM Purnomo Yusgiantoro] juga sudah. Beliau berpesan ini tidak boleh mengurangi kinerja Caltex dan Unocal saat ini."

Bos PT Caltex Pacific Indonesia itu juga menegaskan penataan ulang aset Chevron ini dipastikan tidak akan mengganggu operasi migas di Riau maupun Bontang karena dua blok migas itu masih tetap dikerjakan sesuai rencana pengembangan tahunan yang dilaporkan ke BP Migas. (aprika.hernanda@bisnis.co.id)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM								
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 <u>23</u> 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 8										TAHUN 2005	

Cina Beli Petro Kazakhstan US\$ 4,2 Miliar

Beijing - Perusahaan minyak terbesar Cina mencapai kesepakatan membeli perusahaan minyak Kazakhstan senilai US\$ 4,2 miliar, dan ini merupakan kemenangan Beijing guna mengamankan pasokan energi guna mendukung pertumbuhan ekonominya.

Pengakuisisian PetroKazakhstan Inc., sebuah perusahaan yang berpusat di Kanada, oleh sebuah unit dari China National Petroleum Corp. (CNPC) terjadi hanya tiga minggu setelah CNOOC Ltd. yang berbasis di Hong Kong membatalkan tawaran untuk membeli Unocal karena ditentang para politisi di AS.

Kesepakatan ini, yang masih harus mendapat persetujuan dari para pemegang saham PetroKazakhstan, akan menjadi sebuah akuisisi terbesar di luar negeri yang dilakukan perusahaan-perusahaan Cina.

CNPC International Ltd. setuju membayar US\$ 55 per saham, lebih mahal 21 persen dari harga premium PetroKazakhstan pada penutupan hari Jumat. Saham-saham PetroKazakhstan naik US\$8,35, atau 18 persen, ditutup pada harga US\$53,75 pada hari Senin di New York Stock Exchange.

Tingginya harga itu mencerminkan niat Cina mengamankan pasokan energinya dan pada sisi lain mempererat hubungan dengan Asia Tengah, kata Paul Sampson, koresponden senior pada Energy Intelligence Group di London, penerbit harian *Oil Daily*.

"Mereka melihat perlunya mengaitkan pasokan energi masa depan dengan masalah keamanan nasional dan ada kepastian logistik di balik ini," kata Sampson. Bagaimana nasib PetroKazakhstan selanjutnya belum diketahui.

India Juga Berminat

Sebuah usaha patungan perusahaan India, ONGG Videsh, anak perusahaan

Oil and Natural Gas Corp., dan miliuner Lakshmi Mittal, menjadi pesaing utama dalam pertarungan mendapatkan PetroKazakhstan, lapor *Dow Jones Newswires*, mengutip sebuah sumber di ONGG. "Ini elum akhir permainan...Kesepakatan belum ditutup," demikian pejabat ONGG.

Dalam percakapan melalui telepon, CEO PetroKazakhstan Bernard Isautier mengindikasikan bahwa ada "pihak lain" yang berminat membeli perusahaannya, namun dia menolak mendiskusikan identitasnya atau kesungguhannya.

Ihor P. Wasylkiw, seorang juru bicara PetroKazakhstan, mengatakan, Senin, bahwa tidak ada tawaran baru yang diajukan sejak perusahaan itu mengumumkan tender yang diajukan CNPC.

Beijing mengincar Kazakhstan karena diperkirakan negara itu akan menjadi salah satu penghasil minyak terkemuka di dunia. Penemuan cadangan sangat besar di ladang minyak Kashagan di pantai Laut Kaspia pada 2000 membuat negara itu dijuluki "Kuwaitnya Asia Tengah".

Presiden Cina Hu Jintao mengunjungi Kazakhstan pada Juli lalu dan menandatangani sebuah kesepakatan dengan Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev guna mengembangkan "kemitraan strategis."

PetroKazakhstan berpusat di Calgary, Alberta, namun seluruh produksinya di Kazakhstan, yang punya cadangan 550 juta barel. Kazakhstan mengeksport minyak 800,000 barel per hari. CNPC telah hadir di Kazakhstan, termasuk dalam kemitraan dengan perusahaan minyak negara KazMunaiGaz membangun pipa gas dari Kazakh ke Cina senilai US\$700 juta.

PetroKazakhstan telah terlibat di negara itu sejak 1991 dan membeli perusahaan minyak negara, Yuzhneftegaz, tahun 1996.

PetroKazakhstan baru-baru ini menghadapi sejumlah persoalan besar. April lalu, sebuah keputusan dari regulator di negeri itu memaksa perusahaan segera menghentikan produksi gasnya. Perusahaan itu juga mengakhiri kerjasama dengan perusahaan minyak Rusia Lukoil, dan saling menuntut jutaan dolar. (ap/xha)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9 **Harga Minyak Dekati 66 Dolar AS**

TAHUN 2005

Sigit Pramono
Neraca

Singapura - Harga minyak dunia merangsek mendekati 66 dolar AS per barel, Selasa (23/8). Masih tingginya harga minyak dunia dipicu kekhawatiran soal surutnya pasokan dari Ekuador serta perkiraan langkah AS menambah cadangan minyaknya.

Harga minyak light crude untuk pengiriman Oktober 2005 di pasar AS naik enam sen menjadi 65,81 dolar AS per barel pada pukul 07.10 GMT. Sedangkan untuk pengiriman September 2005 naik 10 sen menjadi 65,45 dolar AS. Di pasar London, Brent crude naik 14 persen menjadi 64,64 dolar AS per barel.

Harga minyak sempat melonjak di atas 67 dolar AS

per barel awal Agustus 2005, yang merupakan rekor tertinggi selama ini. Kali ini, pasokan minyak belum kembali normal karena produksi Ekuador belum 100 persen normal. Hingga Senin (22/8), Ekuador baru memenuhi dua per tiga dari produksi normalnya, 530 ribu barel per hari.

Seretnya pasokan minyak Ekuador disebabkan persoalan politik dalam negeri. Yakni gelombang protes berkepanjangan, yang membuat proses produksi minyak negara itu tersendat sepanjang pekan lalu. Tapi pada Senin (22/8), situasi politik Ekuador mereda, berkat kesepakatan antara pemerintah dan para demonstran.

Gejolak politik dalam negeri juga terjadi di negara produsen minyak lain, Nigeria. Massa demonstran bah-

kan memblokir fasilitas pengeboran minyak Royal Dutch Shell. Mereka menuntut ganti rugi dari tumpahan minyak serta kebakaran akibat proses eksplorasi yang menimpa mereka 2003 silam. Tapi aksi tersebut berakhir Senin (23/8), dan eksplorasi kembali berjalan.

Tapi tak urung aksi protes tersebut membuat was-was pasar minyak dunia. Buntutnya, harga minyak suling di AS menembus harga 53,79 dolar AS tahun ini. Sementara tahun lalu 41,47 dolar AS per barel.

Para dealer minyak juga dibuat lega oleh ekspor dari Irak sebanyak 1,5 juta barel per hari mulai Senin (22/8). Sebelumnya, produksi minyak Irak berhenti total selama 10 jam akibat terputusnya aliran listrik.



Suasana POM bensin di luar negeri, di tengah melonjaknya lagi harga minyak dunia. (Bloomberg)

pangkalan karena stok kosong. Meskipun ada persediaan minyak di pangkalan stok terbatas sehingga dalam beberapa jam kemudian sudah habis.

Selain itu, setiap warga yang membeli minyak tanah di pangkalan dibatasi paling tinggi 10 liter dengan alasan agar warga yang membutuhkan barang tersebut semuanya bisa membeli.

Meskipun dibatasi harga minyak tanah di pangkalan di daerah ini masih diatas HET, yakni Rp 1.200 per liter.

"Tapi, karena kita membutuhkan barang tersebut berapapun harganya dibeli. Yang penting dapat minyak tanah, sehingga kita bisa masak di rumah dengan lancar," ujar Zulkarnain.

Selain itu, persediaan minyak tanah di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim) dalam tiga hari terakhir semakin menipis. Banyak agen-agen yang tutup karena kehabisan stok akibat pasokan dari Pertamina terlambat. Diperkirakan pasokan minyak tanah itu baru masuk ke pangkalan dan agen-agen dalam kurun waktu empat lima hari lagi.

Pangkalan minyak tanah di Kecamatan Sumbersari, Jember, Yulianto dan agen minyak tanah di Kecamatan Kota Jember, Nyonya Wati, ke-

duanya mengakui bahwa dalam dua tiga hari mendatang dapat dipastikan persediaan minyak tanah di kawasan itu kosong. Karenanya, warga Jember yang sebagian besar masih menggunakan minyak tanah untuk bahan bakar dapur rumah tangga, mengeluh atas kondisi kelangkaan selama dua tiga hari terakhir.

Warga Jember, Ny. Wati yang membenarkan, tanda-tanda bakal langkanya minyak tanah sudah ditengarai beberapa hari sebelumnya, dengan terjadinya keterlambatan datangnya mobil-mobil tangki pemasok minyak tanah.

Untuk itu, mereka secara pribadi kemudian berinisiatif membatasi penjualan minyak tanah kepada pedagang yang bukan berasal dari warga wilayah kecamatan masing-masing.

"Kita membatasi setiap langganan hanya 30 liter, sedang pembeli bukan langganan terbatas hanya 10 liter per orang," ujar Wati.

Banyak ibu-ibu rumah tangga mengeluh kembali atas terjadinya kelangkaan minyak tanah di kawasan Jember, utamanya di daerah pinggiran yang seluruhnya menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor masak rumah tangga dan warung. (070/143/120)

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2005

Direksi Pertamina Segera Diganti

Pergantian untuk Perlancar Penandatanganan Kesepakatan Blok Cepu

JAKARTA - Pergantian Direksi PT Pertamina (Persero) tinggal menunggu waktu. Pemerintah telah mengantongi nama dua kandidat yang bakal menduduki jabatan direktur utama BUMN minyak itu, menggantikan Widya Purnama. Keduanya, bukan orang asing bagi Pertamina.

Sejumlah sumber yang dihubungi *Pembaruan* Selasa (23/8) pagi menyebutkan, Iin Arifin Takhyani dan Martiono Hadianto adalah dua calon kuat yang akan menggeser Widya Purnama. Namun dari dua nama itu, Iin disebut-sebut sebagai calon terkuat Dirut Pertamina.

Iin Arifin saat ini menjabat sebagai Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia sebelumnya juga pernah disebut-sebut bakal menjadi Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), menggantikan Rachmat Soedibyo ketika itu, sebelum akhirnya yang terpiilih Kardaya Warnika.

Beberapa sumber *Pembaruan* mengatakan, kiprah Iin Arifin di dunia perminyakan, tak perlu dipertanyakan lagi. Selama menjabat sebagai Dirjen Migas, prestasi Iin juga



DOK PEMBARUAN
WIDYA PURNAMA

menonjol, terutama menyangkut pengembangan lapangan-lapangan migas. Sebut saja, mengenai kontrak pengelolaan dan investasi migas, sebelum jabatan Dirjen dia pegang, dalam satu tahun pemerintah sulit sekali menggandeng investor.

Tetapi, pada masa Iin, tahun 2003 misalnya, pemerintah berhasil mendapatkan sedikitnya 15 kontrak migas. Tahun berikutnya sekitar 17 kontrak, dan tahun ini (2005) diperkirakan tak kurang dari 22 kontrak pengelolaan lapangan migas dapat ditandatangani.

Sedangkan Martiono, kini adalah Komisaris Utama Pertamina, menggantikan Laksamana Sukardi. Dia juga dipercaya oleh pemerintah (melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Aburizal Bakrie) untuk menjadi ketua tim negosiasi dengan Exxon-Mobil dalam perundingan

perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Cepu, ladang minyak di perbatasan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Martiono sebelumnya juga pernah menjabat Dirut Pertamina.

Blok Cepu

Menurut staf ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Malarangeng, beberapa waktu lalu, pergantian Direksi Pertamina memang harus secepatnya dilakukan, setidaknya sebelum tanggal 29 Agustus. Dia tidak menyebut secara langsung alasannya.

Namun, dia melanjutkan, selama Direksi Pertamina tidak diganti maka penandatanganan perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Cepu tidak akan pernah tercapai. Padahal, sesuai hasil kesepakatan tim negosiasi, menurut Rizal yang juga juru bicara tim ini, harus sudah selesai paling lambat tanggal 25 September.

Menko Perekonomian juga pernah mengatakan, siapapun direktur utama Pertamina, penandatanganan kontrak Cepu harus dilakukan. "Jadi tidak soal, siapapun dirutnya, harus ditandatangani," kata

Aburizal.

Sejumlah pejabat (direksi) Pertamina enggan memberikan komentar mengenai rencana pergantian direksi kali ini. Sementara informasi yang diperoleh *Pembaruan* menyebutkan, pelantikan direksi baru sedianya akan dilakukan Selasa (23/8).

Namun, karena hari ini bersamaan dengan sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah untuk mendengarkan keterangan pemerintah (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) tentang kebijakan pembangunan daerah, sehingga para pejabat terkait semakin sulit meluangkan waktu.

"Memang kabar yang kami terima, hari ini akan ada pelantikan direksi baru Pertamina. Tapi sampai sekarang (Selasa siang, Red) *kok* belum jelas juga. Kalau tidak hari ini, ya mungkin besok," kata sumber di Pertamina.

(H-13)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31							
HALAMAN : 6										TAHUN 2005	

KRISIS GAS

PIM Mulai Putus Aliran Listrik untuk Masyarakat

LHOKSEUMAWE (Suara Karya): Manajemen PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) mengancam akan memutuskan aliran listrik bagi masyarakat di sekitarnya, akibat ketidakpastian pasokan gas alam. Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan masalah kelangsungan pasokan gas alam untuk PIM yang akan berakhir 6 September 2005. Terakhir pasokan gas alam untuk PIM didatangkan dari lapangan migas ExxonMobil di Lhok Sukon, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Kepala Biro Humas PIM T Fachrulsyah kepada *Suara Karya*, di Lhokseumawe, Selasa (23/8) mengatakan, aliran listrik untuk masyarakat lingkungan yang selama ini dipasok melalui KUD Wira Karya-Krueng Geukueh, terpaksa diputus akibat beban biaya perusahaan yang semakin berat.

"Dengan harga gas 6,55 dolar AS yang dipatok pemerintah sejak awal Juli lalu, PIM mengalami kerugian mencapai Rp 10

miliar per bulan. Belum lagi subsidi listrik bagi lingkungan sekitar yang mencapai Rp 880 juta per bulan," katanya.

Menurut Fachrulsyah, dengan harga gas sebesar itu, ekuivalen dengan biaya produksi listrik Rp 1.800 per kilowatt hour (KwH), sementara dijual kepada KUD hanya Rp 270 per KwH sehingga terdapat selisih yang cukup besar mencapai Rp 1.530 per KwH. Dengan pasokan listrik sebesar 800 kilowatt, PIM berarti harus menyubsidi lebih dari Rp.0,88 miliar setiap bulan. Berbeda dengan sebelumnya ketika harga gas dipatok 2,3 dolar AS per MMBTU ekuivalen dengan biaya produksi listrik sebesar Rp 475 per KwH.

"Kami memohon maaf kepada masyarakat dan Muspika Kecamatan Dewantara dan Nisam. Hal ini dikarenakan pemutusan listrik terpaksa kami lakukan," ujar Fachrul, sambil berjanji akan memasok kembali jika sudah ada kepastian harga dan pasokan gas dari pemerintah. (Hamdani)

37

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 20												TAHUN 2005																		

AGUS WIJANARKO/REPUBLIKA



MINYAK TANAH LANGKA: Sejumlah pengecer sedang membeli minyak tanah di salah satu agen di Jalan Merpati, Kota Tegal, Selasa (23/8). Sudah sejak beberapa pekan ini minyak tanah sulit didapatkan, karena pasokan dari Pertamina tidak lancar.

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23	24	25 26 27 28 29 30 31						
HALAMAN : 16											TAHUN 2005

Sugiharto: Pergantian Direksi Pertamina Pekan Ini

JAKARTA— Menteri Negara BUMN, Sugiharto, menegaskan pergantian jajaran direksi PT Pertamina (Persero) akan dilakukan dalam waktu satu hingga dua minggu kedepan.

"Proses penyelesaiannya sudah hampir selesai. Insya Allah dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan akan segera kami umumkan siapa-siapa saja yang lulus seleksi," papar Sugiharto, usai rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kemarin.

Sugiharto mengungkapkan, ada 20 calon nama yang masuk dalam bursa pemilihan calon direksi Pertamina yang baru. Namun demikian, dia tidak bersedia merinci siapa-siapa saja kedua puluh calon direksi Pertamina ini.

Keduapuluh calon direksi Pertamina, jelas dia, masih harus menghadapi penilaian dari Tim Penilai Akhir (TPA) yang rencananya akan dilaksanakan dalam waktu satu dua minggu kedepan. "Tergantungan bagaimana proses penilaian akhir (TPA, red) tersebut. Semakin cepat prosesnya, maka semakin cepat pula hasilnya diumumkan," ujarnya singkat.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa, mengungkapkan bahwa proses pergantian jajaran Direksi PT Kereta Api Indonesia

(PT KA) masih sedang dilakukan. Menurut Hatta, ada 20 calon nama yang sudah diusulkan kepada Menteri Negara BUMN.

"Soal pergantian direksi PT KA itu sedang diproses sekarang. Nama-namanya sudah ada di Meneg BUMN, banyak ada 20-an nama," ungkap Hatta. Dari keduapuluh nama tersebut, menurut Hatta, tidak ada yang diusulkan oleh dirinya. Pihaknya, diakui Hatta, hanya mengajukan kriteria calon direksi untuk PT KA bukannya mengajukan nama calon tertentu.

Apakah ada kemungkinan proses pemilihan direksi PT KA ini akan lebih memprioritaskan orang dalam PT KA sendiri, dia hanya menegaskan, kesempatan untuk terpilih baik dari orang dalam maupun orang luar sama besarnya. "Yang penting dia harus mampu dan berkualitas. Bisa dari dalam ataupun dari luar ada juga."

Proses pemilihan calon direksi baru PT KA dinilai seorang pengamat perkeretaapian mengalami kemunduran, khususnya dari aspek partisipasi publik. "Proses uji kelayakan dan kepatutan direksi yang dilakukan Meneg BUMN Sugiharto pada 16 Agustus 2005 mengalami kemunduran dari aspek partisipasi publik," kata Direktur Eksekutif

Indonesian Railway Watch (IRW) Taufik Hidayat saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Menurut Taufik yang juga peneliti perkeretaapian LIPI ini, kemunduran tersebut terjadi jika dibandingkan proses yang sama dengan Meneg BUMN sebelumnya. "Saat itu, proses tersebut tidak hanya melibatkan pejabat di lingkungan internal Kementerian BUMN, namun juga melibatkan Dephub sebagai regulator dan 'stakeholders' lain misalnya LSM (yang diwakili oleh ICW waktu itu), SPKA, pers dan profesional," katanya.

Dikatakannya, seharusnya mekanisme yang sudah baik ini dipertahankan, bukannya malah dihilangkan. Selain itu, kata Taufik, proses itu juga sama sekali tidak melibatkan Dephub, tetapi hanya melibatkan konsultan dan pejabat internal di lingkungan Kementerian BUMN yang masih relatif baru.

"Itu pun yang bersangkutan ditengarai tidak memiliki pengetahuan memadai tentang berbagai permasalahan mendasar perkeretaapian. Jadi dapat dipertanyakan bagaimana kualitas direksi yang dihasilkan dari proses seperti ini?" ucapnya.

Namun, Taufik tidak bersedia menyebutkan nama pejabat di Kementerian BUMN yang dimaksud. Terkait de-

ngan pentingnya Dephub dilibatkan, kata Taufik, karena beberapa alasan antara lain Dephub sebagai regulator yang berperan sangat sentral dalam pengembangan perkeretaapian.

"Dephub itu kan berperan sebagai regulator keselamatan dan kelaikan, sehingga mereka berkepentingan agar semua regulasinya dilaksanakan oleh direksi," katanya.

Ia memaparkan, Dephub sebagai pemilik prasarana pokok perkeretaapian memperoleh anggaran untuk perkeretaapian yang tidak sedikit. Ia mecontohkan dana APBN per tahun untuk prasarana KA yang mencapai Rp 400 miliar dan dana 'public service obligation' (PSO) sebesar Rp 200 miliar, serta pinjaman luar negeri rata-rata Rp 1,2 triliun per tahun.

"Jadi Dephub berkepentingan untuk turut serta memilih direksi yang mampu mengelola dana tersebut dengan benar," tegasnya. Tidak harmonis

Pada bagian lain, Taufik mengakui, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001 tentang pengalihan pembinaan usaha jasa perkeretaapian kepada Kementerian BUMN, hubungan kedua instansi tersebut (Dephub dan Kementerian BUMN) ditengarai sering tidak harmonis. ■ c25

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN : 17										TAHUN 2005	

● LINTAS GLOBAL

Thailand Ganti BBM dengan Sisa Kelapa

THAILAND — Meroketnya harga minyak dunia membuat banyak negara harus mencari sumber alternatif sebagai pengganti minyak bumi. Thailand berencana membangun pembangkit tenaga yang menggunakan bahan bakar kelapa.

Thailand tengah mempelajari rencana pembangunan sarana itu dengan memanfaatkan kelapa bekas. Menurut Kepala Pertanian setempat, Noppadol Pungpong, pemerintah daerah di Provinsi Prachuap Khiri Khan, selatan Bangkok, sedang

mencari pabrik kecil untuk menjadi tempat menyuplai tenaga bagi daerah itu.

Pabrik itu akan memanfaatkan 300 hingga 500 ton kelapa bekas, sekam yang dihasilkan petani setempat. Selama ini barang bekas itu selalu dibuang begitu saja oleh para petani.

Menurut Noppadol, penasihat dari Uni Eropa sedang meneliti yang hasilnya bisa diketahui enam bulan mendatang. "Ini bisa membantu para petani supaya bisa menjual bagian lain dari pohon kelapa, jadi bukan hanya menjual kelapanya."

Harga kelapa kini turun menjadi empat baht atau 10 sen dari sebelumnya 19 baht atau 45 sen tahun lalu. Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra telah berkampanye mencari bahan bakar alternatif untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di Asia. ■ afp/hir

40

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 8										TAHUN 2005	

Bagi Hasil Gas Aceh Tahun Kedelapan

● Papua 25 tahun

Neraca

Jakarta - Dana bagi hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam dalam rangka otonomi khusus untuk Nanggroe Aceh Darussalam diberikan sampai dengan tahun kedelapan. Sedangkan untuk Papua sampai tahun ke-25, sejak diberlakukan undang-undang tentang desentralisasi fiskal dan tentang keuangan negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan soal dana bagi hasil itu saat menyampaikan Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, Selasa (23/8).

"Dalam rangka otonomi khusus, dana bagi hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Aceh diberikan sampai dengan tahun kedelapan. Untuk provinsi Papua sampai dengan tahun ke-25 sebesar 70 persen, sejak diberlakukannya kedua undang-undang itu," kata Presiden.

Dalam pidato yang dihadiri segenap anggota DPD, sejumlah Kabinet Indonesia Bersatu, Ketua DPRD dan perwakilan negara sahabat itu, Yudhoyono juga mengatakan, kebijakan dan bagi hasil dalam tahun anggaran

2006 ditujukan untuk mempercepat penetapan alokasi DBH melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data.

Dana bagi hasil tersebut terkait dengan dana perimbangan tahun 2006 dan strategi ke depan meningkatkan kapasitas keuangan daerah.

Dalam penyempurnaan proses dan mekanisme penyaluran dan abagi hasil, pemerintah melakukan langkah-langkah aktif. Antara lain dengan meningkatkan koordinasi antardepartemen dan instansi terkait, untuk mempercepat penetapan dan penyaluran DBH kepada daerah, agar tepat waktu.

Dengan naiknya harga minyak dunia, realisasi alokasi dan bagi hasil untuk beberapa daerah penghasil migas meningkat secara signifikan, katanya. "Untuk itu, saya mengharapkan agar daerah-daerah penghasil migas dapat bersama-sama berbagi beban di dalam menanggung kenaikan belanja subsidi bagi daerah-daerah bukan penghasil minyak," kata Presiden.

Yudhoyono menambahkan, "Kita perlu bersama-sama mencari formula yang tidak melanggar asas keadilan, keseimbangan serta kebersatuan sebagai negara dalam penyempurnaan alokasi dana bagi hasil."

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2005

REZEKI MIGAS

Daerah Diminta Berbagi

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan daerah-daerah penghasil minyak dan gas (migas) dapat bersama-sama berbagi beban untuk menanggung kenaikan belanja subsidi bagi daerah-daerah yang bukan penghasil migas. Akibat kenaikan harga minyak dunia, realisasi alokasi dana bagi hasil (DBH) untuk beberapa daerah penghasil migas bakal meningkat signifikan.

Harapan Presiden itu dikemukakan dalam Keterangan Pemerintah di hadapan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (23/8) di Gedung DPR/MPR Jakarta.

"Kita akan bersama-sama mencari formula yang tidak melanggar asas keadilan, keseimbangan, serta kebersatuan sebagai negara dalam penyempurnaan alokasi DBH," kata Presiden.

Terhadap pengalokasian dana alokasi umum (DAU), menurut Presiden, rasionya yang tahun lalu 25,5 persen dari penerimaan dalam negeri bersih, tahun ini ditingkatkan menjadi 26 persen.

"Karena itu, alokasi DAU tahun 2006 untuk masing-masing daerah ditetapkan tak lebih kecil dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, jika tahun 2006 ada provinsi yang menerima DAU lebih kecil dari tahun 2005, akan diberikan dana penyesuaian yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Kebijakan ini dilakukan hanya dalam masa transisi," katanya.

Tahun 2008 DAU akan dipergunakan sebagai instrumen keseimbangan fiskal antardaerah. Daerah yang sudah dapat menggal potensi keuangan daerahnya serta memperoleh bagian dari bagi hasil sumber daya alam dan perpajakan akan memperoleh DAU lebih kecil.

Mengenai alokasi dana alokasi khusus (DAK), untuk tahun 2006 pemerintah memulai pengalihan sebagian dana dekonsentrasi yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan lokal. DAK dimaksudkan untuk membantu daerah yang kemampuan keuangannya di bawah rata-rata nasional.

(HAR/INU)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 15

TAHUN 2005

BBM

Sumur Minyak di Kendal Dihidupkan

KENDAL, KOMPAS — Kandungan minyak di bekas sumur minyak peninggalan Belanda yang ada di Klantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, diperkirakan masih bisa dieksploitasi selama 20 tahun. Untuk itu, dalam waktu dekat ini Pertamina Daerah Operasional Hulu Cepu akan mengeksplorasi sumur minyak tersebut guna dilihat kepastian jumlah kandungan minyaknya.

"Sebelum dieksploitasi, sumur minyak di Klantung akan dieksplorasi dulu, yang rencananya dilakukan mulai September nanti. Untuk itu, hari ini (Selasa, 23/8) hal tersebut disosialisasikan kepada warga setempat," kata Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Bachtiar Nurono kemarin.

Ada sekitar 25 bekas sumur

minyak peninggalan Belanda di Klantung yang beberapa di antaranya dikelola atau ditambang oleh warga setempat secara tra-

“

**Sebelum dieksploitasi,
sumur minyak di Klantung
akan dieksplorasi dulu,
yang rencananya
dilakukan mulai
September.**

disional. Sumur-sumur minyak tersebut pernah dioperasikan selama lima tahun, sebelum Belanda meninggalkan Indonesia.

Menurut Bupati Kendal Hendy Boedoro, sumur minyak di Klantung itu merupakan jaminan bagi cerahnya masa depan masyarakat Kabupaten Kendal. Dengan perkiraan kandungan minyak bisa dieksploitasi selama 20 tahun, Hendy yakin hal itu akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar sumur minyak Klantung.

Eksplorasi sumur minyak Klantung itu, lanjut Hendy, nantinya akan dilakukan Pertamina bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Dengan demikian, ada pemasukan untuk pendapatan asli daerah yang saat ini baru mencapai sekitar Rp 50 miliar. Diharapkan pula, eksploitasi itu dapat meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kendal yang saat ini masih belum merata akibat dana yang terbatas. (IKA)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2005

Chevron sets up new unit for RI

Following the recent merger of U.S. energy giants Unocal and

Leony Aurora
The Jakarta Post/Jakarta

Yudiana said there were no plans to merge Chevron and Unocal's subsidiaries in

Chevron, the company plans to establish a new business unit to take charge of its subsidiaries working in the upstream and geothermal sectors in Indonesia and the Philippines.

The new unit will be called Chevron IndoAsia, said Wahyudi Yudiana Ardiwinata, the president director of PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) — a Chevron subsidiary after the merger with Caltex — on Tuesday.

"We have started the preparations and expect the business unit will be established this year," he said. The downstream businesses, such as Caltex Oil Indonesia, which sells lubricants, would not be included in IndoAsia.

Unocal, the ninth-largest U.S. oil company, on July 20 accepted an improved takeover bid by Chevron on July 20. The bid was worth US\$17.1 billion, and followed the rejection of a higher but politically controversial bid from state-owned China National Offshore Oil Corp. (CNOOC).

Indonesia.

"The companies' core businesses are different, with CPI concentrating on upstream onshore activities and Unocal operating onshore and in the LNG (liquefied natural gas) business," he said.

The subsidiaries would be able to share services with one another under the Indo Asia umbrella, he added.

CPI is the largest oil producer in Indonesia, producing 478,000 barrels per day at present, roughly half of the country's total oil output, from its wells across Riau province.

ChevronTexaco Energy Indonesia Ltd. operates the Darajat geothermal power-generating operations in West Java.

Unocal, according to its website, has interests in 10 production sharing areas in Indonesia, including the deepwater West Seno field in the Makassar strait. It also operates the Attaka field, which supplies gas to the Badak LNG plant in Bontang, East Kalimantan.

MONITOR BERITA

) BISNIS INDONESIA
) INVESTOR DAILY
) KOMPAS
) KORAN TEMPO
) MEDIA INDONESIA
) NERACA
) PIKIRAN RAKYAT
) RAKYAT MERDEKA
) REPUBLIKA
) SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : A 2

TAHUN 2005

Berbagi Beban dengan Daerah

SUBSIDI bahan bakar minyak semakin berat membebani anggaran belanja negara. Dengan harga minyak dunia di atas US\$ 60 per barel, beban subsidi tahun ini bisa melebihi Rp 100 triliun. Maka ajakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar daerah penghasil minyak ikut menanggung subsidi BBM patut dipertimbangkan sungguh-sungguh.

Memang ada ketimpangan soal subsidi ini. Ketika harga minyak di pasar dunia naik, pendapatan daerah penghasil minyak dalam bentuk dana bagi hasil juga ikut meningkat. Tapi, ketika pemerintah menanggung subsidi, akibat menjual BBM di dalam negeri dengan harga di bawah harga pasar dunia, beban subsidi ditanggung sendirian oleh pusat.

Berdasarkan UU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, daerah penghasil minyak memperoleh bagian 30 persen, kecuali Aceh dan Papua yang berstatus daerah otonomi khusus. Pendapatan selebihnya disetor ke kas pemerintah, untuk kemudian dibagikan ke daerah lain melalui dana alokasi umum.

Melihat proporsi di atas, sesungguhnya daerah penghasil minyak sudah cukup besar menyerahkan hasil buminya kepada pusat. Dengan kenaikan harga minyak dunia, pendapatan pusat juga meningkat.

Namun, melihat beban yang ditanggung pemerintah pusat, wajar jika Presiden Yudhoyono sampai melontarkan ajakan itu. Dalam APBN 2005, subsidi BBM semula dianggarkan Rp 19 triliun, dengan asumsi harga minyak US\$ 24 per barel. Besarnya subsidi BBM kemudian diubah menjadi Rp 76,5 triliun dalam APBN Perubahan 2005, dengan asumsi harga minyak US\$ 45. Namun, kemungkinan besar subsidi membengkak sampai di atas Rp 100 triliun karena harga minyak di atas US\$ 60.

Beban berat subsidi sangat pantas dibagi dengan daerah. Sebab, BBM bersubsidi juga dijual di daerah-daerah, tak hanya di Jakarta.

Kalau mau berbagi beban, hasil penjualan minyak mentah dari bumi kita di pasar dunia dikurangi subsidi BBM dan baru dibagi antara pusat dan daerah dengan proporsi 70 : 30. Artinya, jatah daerah penghasil minyak yang 30 persen itu benar-benar berupa penerimaan bersih.

Tentu Presiden Yudhoyono tidak bisa langsung memangkas jatah daerah, karena ada undang-undang yang mengaturnya. Perlu persetujuan DPR untuk melakukannya. Daerah penghasil minyak juga perlu diyakinkan.

Dengan kata lain, mengajak daerah berbagi beban subsidi memang ide yang masuk akal, tapi perlu waktu panjang untuk melakukannya.

Di saat seperti ini, ketika harga minyak sudah 30 persen di atas asumsi APBN Perubahan 2005, pemerintah seharusnya mengurangi subsidi dengan cara menaikkan harga BBM. Dampak kenaikan ini bisa dikurangi, misalnya, dengan menerapkan subsidi terbatas untuk beberapa sektor yang dianggap rawan, seperti angkutan umum.

Dalam jangka panjang, bisa saja dicari energi alternatif, misalnya, penggunaan gas untuk industri dan listrik. Dalam jangka pendek, hanya kenaikan harga BBM yang sanggup mengurangi beban berat anggaran negara. ●

47

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2005

Oil prices hold above \$65 as storm sets course for Gulf of Mexico

Associated Press
Vienna

Oil futures held above US\$65 a barrel on Tuesday amid lingering global supply concerns despite resumed crude flows from Ecuador and Nigeria.

The rise came amid expectations that Wednesday's U.S. petroleum inventories will show declines in both crude and gasoline stocks with little indication that high prices are slowing demand.

A new tropical storm heading toward the Gulf or Mexico added to worries. Still analysts cautioned against overemphasizing its effect on the market, saying such weather was widely expected this time of year.

Light, sweet crude for October on the New York Mercantile Exchange was down 2 U.S. cents at \$65.63 a barrel by afternoon in Europe on its opening day of trade as the front-month contract. It had settled 14 U.S. cents

lower to \$65.65 on Monday.

Nymex crude reached an all-time high of \$67.10 a barrel on Aug. 12. Prices are around 40 percent higher than a year ago, and the Global Center for Energy Studies, or GCES, warned on Tuesday that it could keep climbing.

"Rising global oil demand is continuing to put pressure on the industry's ability to supply enough oil," the London-based resources institute said in its latest report.

The world's daily diet of crude is expected to average around 83 million barrels in the current third quarter before spiking to 85.5 million barrels a day in the fourth quarter of 2005 during winter, GCES said.

With the end of the American summer driving season looming, analysts are now watching winter demand for distillates — heating oil, diesel and jet fuel — when consumption of the commodities rise.

Nymex heating oil was up

slightly at \$1.8165 a gallon (3.8 liters) while gasoline was down somewhat, fetching \$1.8558 a gallon.

On London's International Petroleum Exchange, October Brent crude was 17 U.S. cents at \$64.67 a barrel.

On Wednesday, the U.S. Department of Energy will release its weekly petroleum data snapshot, an indicator of demand from the world's largest energy user.

Analysts surveyed by *Dow Jones Newswires* predicted that gasoline stocks will fall by a million barrels from a week ago, while crude probably fell by 255,000 barrels.

Meanwhile, Tropical Storm Jose formed and began to pick up strength late Monday, heading for Mexico's Gulf coast as the active Atlantic hurricane season continued to roil oil markets. Hurricanes have forced rig and production shutdowns on both the U.S. and Mexican sides of the Gulf, hurting supply.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 6											TAHUN 2005																			

Pipanisasi Gas Kaltim ke Jawa Butuh US\$ 1,3 Miliar

Jakarta - Pemerintah melalui Perusahaan Gas Negara (PGN) akan membangun pipanisasi gas dari Kalimantan Timur ke Jawa senilai US\$ 1,3 miliar dan ditargetkan selesai pada tahun 2009 untuk mengurangi penggunaan BBM (bahan bakar minyak) di Jawa.

Hal itu diputuskan dalam rapat energi yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (22/8), dan dihadiri oleh Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, Dirut PLN Eddie Widiono, Dirut Petrokimia Gresik Arifin Tasrif, dan Dirut PGN WMP Simanjuntak.

Menurut Kepala BPH Migas Tubagus Haryono, rapat tersebut membahas bagaimana mengalihkan BBM ke gas, khususnya di pulau Jawa. Oleh karena itu, pemerintah

antara lain menyepakati membangun pipanisasi gas dari Kaltim ke Jawa dan membangun terminal penerima serta dua drain di Tangguh, Papua, untuk dipasok ke Jawa.

"Dalam waktu dekat kami akan melakukan pelelangan hak khusus pengangkutan gas bumi melalui transmisi Kalimantan Timur ke Jawa sepanjang 1.200 kilometer," katanya.

Sementara itu, Simanjuntak menambahkan, Bank Pembangunan Asia (ADB) sudah bersedia menjadi *lead consortium* dari sisi pendanaan tanpa jaminan pemerintah.

Menurutnya, dari pipanisasi gas Kaltim ke Jawa itu akan menghasilkan aliran gas sekitar satu miliar kaki kubik per hari atau 10 juta kilo liter BBM per tahun. Dari

dua drain LNG (Liquid Natural Gas) di lapangan Tangguh di Papua juga menghasilkan pasokan gas yang sama ke Jawa.

Selain dari Tangguh dan Kaltim, pasokan gas untuk Jawa juga diperoleh dari Sumsel yang pemipanya sedang berlangsung saat ini dengan kapasitas 1 miliar kaki kubik per hari. Dengan demikian pada tahun 2009, aliran gas diperkirakan mencapai 30 miliar kaki kubik per hari atau setara dengan 30 juta kilo liter BBM.

Dirut PGN itu mengemukakan konsorsium nasional yang diperkirakan mendukung proyek tersebut, baik pipanisasi maupun *terminal receiving* adalah sejumlah BUMN diantaranya PT Petrokimia Gresik, PGN, PLN, dan pengusaha nasional. (ant/rvs)

49

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 6										TAHUN 2005	

Pemerintah Minta Pertamina Jelaskan Soal Klaim Blok Cepu

Jakarta - Pemerintah akan memanggil manajemen PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan dari BUMN itu, soal hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) yang mengklaim kepemilikan saham Pertamina di blok migas Cepu sebesar 55 persen. Sikap ini berbeda dengan kesepakatan yang dibuat oleh tim negosiasi pemerintah dan Exxonmobil.

"Kami akan minta penjelasan karena ini masalah penting," ujar Menteri Energi Sumber Daya dan Energi (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Istana Wapres, Jakarta, Senin (22/8).

Purnomo mengatakan penjelasan Pertamina perlu diketahui pemerintah karena berbeda dari kesepakatan

semula. Nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) tentang pengelolaan blok Cepu menyebutkan 45 persen kepemilikan untuk Pertamina, 45 persen untuk Exxon Mobil, dan Pemda sebesar 10 persen. Penjelasan itu sendiri diharapkan bisa didapat pemerintah sebelum 25 September 2005 ini.

Sebelumnya diketahui, Dirut PT Pertamina (Persero) Widya Purnama mengatakan Pertamina menginginkan kepemilikan sebesar 55 persen dari blok Cepu. Selanjutnya, Pertamina yang kemudian memutuskan apakah memberikan sebagian kepemilikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). (rikando somba)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 6		TAHUN 2005

Daerah Penghasil Migas Harus Berbagi Beban

JAKARTA (Media): Daerah penghasil minyak dan gas (migas) diminta berbagi beban dalam menanggung kenaikan belanja subsidi bagi daerah yang bukan penghasil migas.

Mia perlu mencari formula yang tidak melanggar asas keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan dalam menyempurnakan alokasi dana bagi hasil," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, kemarin.

Dalam penyempurnaan proses dan mekanisme penyaluran dana bagi hasil ke daerah, pemerintah menempuh langkah-langkah aktif dengan meningkatkan koordinasi antardepartemen dan instansi untuk mempercepat penetapan serta penyaluran dana bagi hasil agar tepat waktu.

Kebijakan dana bagi hasil dalam tahun anggaran 2006 memang ditujukan untuk mempercepat penetapan alokasi melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data. Penetapan itu mengacu kepada UU tentang Desentralisasi Fiskal dan UU Keuangan Negara.

Dalam rangka otonomi khusus, dana bagi hasil pertambangan, minyak bumi dan gas alam untuk Aceh dan Papua diberikan sebesar 70%. Jangka waktunya, Aceh diberikan

sampai dengan tahun kedelapan, sedangkan Papua sampai tahun ke-25.

Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menyatakan pembagian beban subsidi ke daerah itu belum bisa diterapkan. Alasannya, belum ada dasar hukum untuk melaksanakannya.

"Untuk melakukan itu harus ada payung hukumnya," ujar Aburizal.

Pada prinsipnya, semua subsidi tidak bisa ditanggung oleh pemerintah pusat. Karena itu, harus ada pembagian beban, daerah yang kuat membantu yang lemah.

Mengenai kemungkinan adanya daerah yang menolak konsep tersebut, dia menyatakan tidak menjadi masalah.

Selisih harga
Sementara itu, anggota Panitia Anggaran DPR Ahmad Farihal mengatakan negara berpotensi rugi sekitar Rp6,9 triliun setiap tahun dalam 25 tahun ke depan akibat penjualan gas (LNG) ke Fujian, China, dari British Petroleum (BP) Tangguh, Papua. Hal itu akibat selisih harga jual yang sudah dipa-

tok untuk kurun 25 tahun dengan harga pasar.

Menurut Farihal, ketika kontrak ditandatangani pada 2002, harga jual LNG Tangguh ditetapkan US\$2,6 per MMBTU. Sedangkan harga di pasar sudah mencapai US\$8 per MMBTU. Jumlah LNG yang dijual ke Fujian sesuai kontrak sebanyak 2,5 juta ton per ta-

Rp6,9 triliun setiap tahun," jelas Farihal menanggapi pembahasan RAPBN 2006 dari sektor minyak dan gas.

Melihat potensi kerugian yang sangat besar itu, dia berharap KPK segera memeriksa kemungkinan adanya permainan pada pelaksanaan kontrak tersebut.

"Semua pihak yang ikut dalam proses kontrak seharusnya diminta penjelasan. Karena, biasanya kontrak soal harga penjualan sesuai harga pasar internasional. Mengapa kita membuat kontrak dalam jangka waktu sangat lama dengan harga tetap. Tidak mengikuti fluktuasi harga pasar internasional. Ini tanda tanya besar yang harus dijawab," kata Farihal.

Dia memberikan contoh, penjualan LNG Badak (Kaltim) terhadap konsumen di luar negeri disepakati sesuai harga pasar internasional, juga sistem seperti itu sudah berlaku di seluruh dunia.

"Kok kita jadi mundur," tambahnya.

Dalam pidatonya, Presiden juga mengungkapkan bahwa pengembangan energi di daerah masih belum banyak dimanfaatkan, terutama energi yang terbarukan seperti bioenergi, panas bumi, energi surya, energi angin, dan energi samudra.

(Sdk/Faw/E-2)

'Semua subsidi tidak bisa ditanggung pemerintah pusat. Karena itu, harus ada pembagian beban.'

hun, dan kontrak berlaku selama 25 tahun.

"Selama 25 tahun ini pendapatan yang kita terima hanya US\$8,4 miliar per tahun. Sedangkan jika dijual sekarang dengan harga pasar sebesar US\$8 per MMBTU, pendapatan negara mencapai US\$25 miliar. Berarti kerugian dari LNG saja sebesar US\$17,4 miliar atau sekitar

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31									
HALAMAN : 1											TAHUN 2005

TPA Restui Iin Arifin Jadi Dirut Pertamina

JAKARTA – Tim Penilai Akhir (TPA) calon direksi badan usaha milik negara (BUMN) memuluskan langkah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Iin Arifin Takhyhan untuk menduduki kursi direktur utama PT Pertamina. Lin berhasil menggeser dua calon kuat lainnya, Martiono Hadianto dan Tubagus Haryono.

Sumber *Investor Daily* mengatakan, setelah melalui proses panjang dan terjadi tarik menarik kepentingan, pihak TPA menetapkan Lin sebagai dirut Pertamina menggantikan Widya Purnama.

"Pertarungan dan permainan saat penentuan dirut Pertamina cukup seru. Bahkan pedagang dari Singapura pun ikut bermain," ujarnya.

Sebelum nama Lin muncul sebagai pemenang, ujar sumber itu, nama Martiono Hadianto masih disebut sebagai calon terkuat. Kendati demikian, Martiono akhirnya terdepak karena ia tak mau bekerjasama dengan beberapa calon lain yang tidak disukainya. "Ya, dia *nggak* menang hanya karena dia tidak mau mengakomodasi orang-orang yang punya kepentingan. Ini berarti, Pertamina akan main dengan orang luar," katanya.

Sumber itu menyayangkan proses pemilihan direktur Pertamina yang memasukkan orang yang tidak layak dan tidak kompeten di bidangnya. "Sayang, saya berharap Pertamina itu bersih. Tapi bagaimana lagi, banyak mafia yang main, tarik-menarik antara pemasok atau pedagang (*broker*). Jadi saling mempengaruhi dan menjegal," tuturnya.

Meski demikian, sumber itu tidak bisa memastikan nama anggota direksi lain yang menjadi patner Lin. "Saya *nggak* bisa *sebutin*. Tapi, kayaknya semua dirombak. Kalau tidak salah, direktur keuangan akan dijabat Gita Wiryawan, direktur hulu antara Kun Kunerly dan Hari Koestoro, sementara kandidat direktur hilir yang digabung dengan direktur pemasaran dan niaga akan dipegang Hari Poernomo," tandasnya.

Fit and Proper Test

Sementara itu, pemerintah telah menetapkan 37 profesional yang siap menjalani *fit and proper test* untuk memimpin PT Pertamina. Meneg BUMN Sugiharto mengungkapkan, dari 37

orang tersebut, baru 17 orang yang sudah menjalankan *fit and proper test*. Sementara 20 orang sisanya masih belum.

Menurut Sugiharto, setelah *fit and proper test*, sejumlah calon masih mengikuti sejumlah tes lain. "Masih ada tiga tes lagi," ujar Sugiharto di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (23/8).

Sugiharto menjelaskan, calon tunggal dirut Pertamina akan diajukan ke Presiden dalam satu hingga dua pekan mendatang.

Di tempat terpisah, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menambahkan, calon Dirut Pertamina harus bisa mengerti masalah operasional dan juga soal uang. Hal itu berkaitan dengan dua masalah yang dihadapi Pertamina yakni masalah keuangan dan masalah operasional. (c63/ari)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	21 22 23	24	25 26 27 28 29 30 31						
HALAMAN : 7											TAHUN 2005

Stok BBM Nasional Capai 22,1 Hari

JAKARTA – Saat ini, stok bahan bakar minyak (BBM) nasional rata-rata sudah mencapai level normal yakni 22,1 hari. Stok tersebut masing-masing premium 19,7 hari, minyak tanah 23,8 hari, solar 21,4 hari, dan avtur 28,5 hari. “Stok BBM kita sudah aman dan ideal,” jelas Kepala Divisi BBM Pertamina Ahmad Faisal kepada *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (23/8).

Menurut Faisal, pada bulan September Pertamina akan me-

ngimpor produk BBM sebanyak 17,2 juta barel dan impor rutin minyak tanah sekitar 11,429 juta barel. Ini dilakukan untuk mengamankan stok 22 hari. Saat ini, konsumsi BBM nasional juga relatif normal pada kisaran 180 kilo liter (KL) per hari.

Dengan kondisi stok itu, menurut Faisal seharusnya tidak terjadi kelangkaan BBM di beberap daerah. Walaupun terjadi, dia memperkirakan, kemungkinan disebabkan ma-

salah distribusi yang kurang lancar.

Beberapa daerah telah diberitakan mengalami kelangkaan BBM. Di Gowa Sulawesi Selatan, Tegal Jawa Tengah, dan Yogyakarta warga telah antre membeli minyak tanah dan pembelannya dijatah. Akibatnya, harga minyak tanah naik hingga Rp 1.100 hingga 1.200 per liter dari harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp 950 per liter.

Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau juga diberitakan mengalami kelangkaan BBM jenis premium. Para pembeli kendaraan bermotor sampai antre panjang, dan terpaksa membeli premium super jenis pertamax dan pertamax plus. Karena kelangkaan itu, harga premium di tingkat eceran dijual hingga di atas harga Rp 3.000 per liter.

Pasokan Batam

Faisal mengatakan, Senin malam (22/8), Pertamina telah mengirimkan 180 ribu barel premium ke Batam untuk mengatasi kebutuhan di Kepulauan Riau dan Batam. “Kita perkirakan, itu cukup untuk kebutuhan 10 hari,” jelas dia.

Dia mengaku, pasokan BBM ke Batam sempat terlambat hingga dua hari. Penyebabnya, faktor alam berupa gelombang laut yang besar sempat menghambat pengiriman BBM ke wilayah itu, karena ukuran kapal tanker Pertamina relatif kecil. (lim)

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input checked="" type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL <u>AGST</u> SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 <u>23</u> 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 14										TAHUN 2005	

BBM Langka di Kupang, Bengkulu, dan Jember

KUPANG - Krisis bahan bakar minyak (BBM) melanda Kota Kupang dan beberapa kota kabupaten lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hingga Senin (23/8) petang dan Selasa (23/8) pagi, antrean panjang terlihat di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada. Bahkan, puluhan kendaraan bermotor tidak terlayani di SPBU yang terletak di bilangan Oebufu, karena persediaan premium habis. Selain premium, minyak solar persediaan habis sehingga nelayan tidak melaut. Akibatnya di Kota Kupang hingga Selasa (23/8) siang tidak penjualan ikan.

Wira Penjualan Pertamina Unit Pemasaran V Cabang Kupang, Windrian Kurnia, kepada *Pembaruan* di Kupang, Selasa (23/8) pagi mengatakan, kondisi tersebut merupakan imbas kelangkaan secara nasional, juga karena meningkatnya permintaan yang cukup tajam. Salah satu sebab meningkatnya permintaan itu karena laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, terutama roda dua di NTT tahun ini yang begitu meningkat.

Dijelaskan, jumlah BBM khusus solar dan premium yang disalurkan Pertamina ke NTT pada periode Januari-Juni tahun lalu, sebanyak 87.412

kilo liter(Kl) dan 57.098 kl. Sementara pada periode yang sama tahun ini, jumlah BBM yang disalurkan Pertamina ke NTT meningkat menjadi 93.288 kl untuk solar dan 63.314 kl premium.

Dikatakan, peningkatan ini juga memperbesar kelebihan kuota BBM untuk NTT pada tahun ini. Sebab, kuota premium untuk NTT tahun ini yang ditetapkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 117.067 kl. Dari kuota yang ada, seharusnya penyaluran Januari-Juni hanya 58.533, 5 kl. Namun realisasinya, jumlah premium yang disalurkan pada periode tersebut sebanyak 63.314 kl atau lebih empat persen dari kuota.

Sedangkan untuk solar, kuota yang ditetapkan pemerintah tahun ini sebanyak 186.187 kl. Dengan demikian, rata-rata penyaluran setiap bulan sesuai kuota seharusnya 15.515,58 kl atau 93.093,5 kl dalam satu semester (Januari-Juni). Tetapi realisasi yang disalurkan sebanyak 93.288 kl atau lebih 0,11 persen dari kuota satu semester. Sementara minyak tanah, kuota 89.662 kl/tahun, atau 44.831 kl/semester atau 7.471,8 kl/bulan. Yang direalisasi sampai Juni sebanyak 48.193 kl atau lebih 7,5 persen dari kuota.

Dengan kondisi yang ada,

pihaknya memprediksikan sampai akhir tahun 2005 akan terjadi kelebihan kuota 8-9 persen untuk premium, 2-3 persen untuk solar dan 10-14 persen untuk minyak tanah. Di mana, peningkatan kebutuhan solar dan premium, disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, terutama kendaraan bermotor roda dua.

Menurut Windrian, penentuan jumlah kuota itu berdasarkan data penduduk, tingkat pertumbuhan kendaraan dan industri dari statistik. Dari data yang ada, kemudian dibuat estimasi kebutuhan, jumlah jaringan dan rencana pembuatan jaringan (RPJ). Dari hasil perhitungan tersebut, kemudian disampaikan ke pemerintah dan DPR yang menentukan kuota BBM.

Ia menegaskan, Pertamina tidak berhak menentukan kuota BBM, melainkan ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Seringkali penentuan kuota lebih rendah dari jumlah yang diajukan, karena disesuaikan dengan keuangan negara. Itulah sebabnya, Pertamina tidak bisa menaikkan kuota begitu saja. Meskipun demikian, selama ini jumlah yang kita salurkan sudah melebihi kuota, sehingga menjadi tanggungan Pertamina.

Sementara itu, persediaan minyak tanah di Kabupaten

Rejang Lebong, Bengkulu dan sekitar sejak beberapa bulan ini mengalami kelangkaan. Akibatnya harga eceran bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga di daerah ini melambung Rp 1.600 per liter.

Padaahal, harga eceran tertinggi (HET) minyak tanah berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati Rejang Lebong di tingkat pangkalan Rp 1.000 per liter dan harga di pedagang pengencer paling tinggi Rp 1.100 per liter.

Tapi, karena persediaan minyak tanah di pangkalan dalam beberapa bulan terakhir sering mengalami kelangkaan harga bahan bakar tersebut jauh diatas HET yang ditetapkan pemkab setempat Rp 1.600 per liter.

"Saya tidak mengerti kenapa akhir-akhir ini persediaan minyak tanah di Rejang Lebong sering mengalami kelangkaan. Padahal, kalau kita baca di koran persediaan bahan bakar ini di Bengkulu cukup banyak. Tapi, kenyataan di lapangan minyak tanah sering langka yang menyebabkan harganya selangit," ujar Zulkarnain (35), warga Talang Rimbo, Kecamatan Kota Curup kepada *Pembaruan*, di Curup, Senin (22/8).

Ia mengatakan, sejak beberapa bulan terakhir masyarakat Rejang Lebong sulit mendapatkan minyak tanah di

pangkalan karena stok kosong. Meskipun ada persediaan minyak di pangkalan stok terbatas sehingga dalam beberapa jam kemudian sudah habis.

Selain itu, setiap warga yang membeli minyak tanah di pangkalan dibatasi paling tinggi 10 liter dengan alasan agar warga yang membutuhkan barang tersebut semuanya bisa membeli.

Meskipun dibatasi harga minyak tanah di pangkalan di daerah ini masih diatas HET, yakni Rp 1.200 per liter.

"Tapi, karena kita membutuhkan barang tersebut berapapun harganya dibeli. Yang penting dapat minyak tanah, sehingga kita bisa memasak di rumah dengan lancar," ujar Zulkarnain.

Selain itu, persediaan minyak tanah di wilayah Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim) dalam tiga hari terakhir semakin menipis. Banyak agen-agen yang tutup karena kehabisan stok akibat pasokan dari Pertamina terlambat. Diperkirakan pasokan minyak tanah itu baru masuk ke pangkalan dan agen-agen dalam kurun waktu empat lima hari lagi.

Pangkalan minyak tanah di Kecamatan Summersari, Jember, Yulianto dan agen minyak tanah di Kecamatan Kota Jember, Nyonya Wati, ke-

duanya mengakui bahwa dalam dua tiga hari mendatang dapat dipastikan persediaan minyak tanah di kawasan itu kosong. Karenanya, warga Jember yang sebagian besar masih menggunakan minyak tanah untuk bahan bakar dapur rumah tangga, mengeluh atas kondisi kelangkaan selama dua tiga hari terakhir.

Warga Jember, Ny. Wati yang membenarkan, tanda-tanda bakal langkanya minyak tanah sudah ditengarai beberapa hari sebelumnya, dengan terjadinya keterlambatan datangnya mobil-mobil tangki pemasok minyak tanah.

Untuk itu, mereka secara pribadi kemudian berinisiatif membatasi penjualan minyak tanah kepada pedagang yang bukan berasal dari warga wilayah kecamatan masing-masing.

"Kita membatasi setiap langganan hanya 30 liter, sedang pembeli bukan langganan terbatas hanya 10 liter per orang," ujar Wati.

Banyak ibu-ibu rumah tangga mengeluh kembali atas terjadinya kelangkaan minyak tanah di kawasan Jember, utamanya di daerah pinggiran yang seluruhnya menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar kompor masak rumah tangga dan warung. (070/143/120)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : A II

TAHUN 2005

Banyumas dan Surakarta Langka Minyak

BANYUMAS — Banyumas dan Surakarta, Jawa Tengah, langka minyak tanah. Minyak yang dipatok berharga eceran tertinggi Rp 950 tiap liter melonjak menjadi Rp 1.400 per liter. Tiap pembeli dijatah maksimal 10 liter.

Pengusaha pangkalan minyak, Wasitah Yusup, mengatakan bahwa minyak tanah langka lebih dari sepekan. "Suplai dari Pertamina menurun drastis," ujarnya kemarin. Dalam sebulan, ia biasa mendapat dua tangki minyak, sekarang hanya separuhnya.

Sedangkan di Solo dan sekitarnya, warga kesulitan memperoleh minyak tanah beberapa hari terakhir. Untuk mendapatkan minyak tanah di pangkalan dan agen penjualan, masyarakat harus antri dengan menggunakan kupon. Pembeli hanya dijatah dua liter per hari. ● ARI AJI HS | ANAS SYAHIRUL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>		
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31			
HALAMAN : 6			TAHUN 2005

Daerah Penghasil Migas Harus Berbagi Beban

JAKARTA (Media) Daerah penghasil minyak dan gas (migas) diminta berbagi beban dalam menanggung kenaikan belanja subsidi bagi daerah yang bukan penghasil migas.

Sia perlu mencari formula yang tidak melanggar asas keadilan, keseimbangan, dan kebersamaan dalam menyempurnakan alokasi dana bagi hasil," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, kemarin.

"Dalam penyempurnaan proses dan mekanisme penyaluran dana bagi hasil ke daerah, pemerintah menempuh langkah-langkah aktif dengan meningkatkan koordinasi antardepartemen dan instansi untuk mempercepat penetapan serta penyaluran dana bagi hasil agar tepat waktu."

Kebijakan dana bagi hasil dalam tahun anggaran 2006 memang ditunjang untuk mempercepat penetapan alokasi melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data. Penetapan itu mengacu kepada UU tentang Desentralisasi Fiskal dan UU Keuangan Negara.

Dalam rangka otonomi khusus, dana bagi hasil pertambangan, minyak bumi, dan gas alam untuk Aceh dan Papua diberikan sebesar 70%. Jangka waktunya Aceh diberikan

sampai dengan tahun kedelapan, sedangkan Papua sampai tahun ke-25.

Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menyatakan pembagian beban subsidi ke daerah itu belum bisa diterapkan. Alasannya, belum ada dasar hukum untuk melaksanakannya.

"Untuk melakukan itu harus ada payung hukumnya," ujar Aburizal.

Pada prinsipnya, semua subsidi tidak bisa ditanggung oleh pemerintah pusat. Karena itu, harus ada pembagian beban, daerah yang kuat membantu yang lemah.

Mengenai kemungkinan adanya daerah yang menolak konsep tersebut, dia menyatakan tidak menjadi masalah.

Selisih harga Sementara itu, anggota Panitia Anggaran DPR Ahmad Farial mengatakan negara berpotensi rugi sekitar Rp6,9 triliun setiap tahun dalam 25 tahun ke depan akibat penjualan gas (LNG) ke Fujian, China, dari British Petroleum (BP) Tangguh, Papua. Hal itu akibat selisih harga jual yang sudah dipa-

tok untuk kurun 25 tahun dengan harga pasar.

Menurut Farial, ketika kontrak ditandatangani pada 2002, harga jual LNG Tangguh ditetapkan US\$2,6 per MMBTU. Sedangkan harga di pasar sudah mencapai US\$8 per MMBTU. Jumlah LNG yang dijual ke Fujian sesuai kontrak sebanyak 2,5 juta ton per ta-

Rp6,9 triliun setiap tahun," jelas Farial menanggapi pembahasan RAPBN 2006 dari sektor minyak dan gas.

Melihat potensi kerugian yang sangat besar itu, dia berharap KPK segera memeriksa kemungkinan adanya permainan pada pelaksanaan kontrak tersebut.

"Semua pihak yang ikut dalam proses kontrak seharusnya diminta penjelasan. Karena, biasanya kontrak soal, harga penjualan sesuai harga pasar internasional. Mengapa kita membuat kontrak dalam jangka waktu sangat lama dengan harga tetap. Tidak mengikuti fluktuasi harga pasar internasional. Ini tanda tanya besar yang harus dijawab," kata Farial.

Dia memberikan contoh, penjualan LNG Badak (Kaltim) terhadap konsumen di luar negeri disepakati sesuai harga pasar internasional, juga sistem seperti itu sudah berlaku di seluruh dunia.

"Kok kita jadi mundur," tambahnya.

Dalam pidatonya, Presiden juga mengungkapkan bahwa pengembangan energi di daerah masih belum banyak dimanfaatkan, terutama energi yang terbarukan seperti bioenergi, panas bumi, energi surya, energi angin, dan energi samudra.

(Sdk/Faw/E-2)

'Semua subsidi tidak bisa ditanggung pemerintah pusat. Karena itu, harus ada pembagian beban.'

hun, dan kontrak berlaku selama 25 tahun.

"Selama 25 tahun ini pendapatan yang kita terima hanya US\$8,4 miliar per tahun. Sedangkan jika dijual sekarang dengan harga pasar sebesar US\$8 per MMBTU, pendapatan negara mencapai US\$25 miliar. Berarti kerugian dari LNG saja sebesar US\$17,4 miliar atau sekitar

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 1		TAHUN 2005

Minyak Tanah Langka

Diperkirakan Digunakan untuk Mengoplos Solar

JAKARTA, KOMPAS — Minyak tanah kembali langka di pasaran. Hal itu terjadi akibat buruknya sistem distribusi dua pekan terakhir ini, setidaknya di tujuh provinsi, yakni di Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan di Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (23/8), sejumlah pangkalan minyak tanah dalam dua pekan belakangan ini kesulitan mendapatkan pasokan BBM tersebut. Hal itu antara lain terjadi di Kabupaten Tabalong, Banjar, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu.

Kelangkaan minyak tanah ini terjadi hampir bersamaan dengan naiknya harga solar untuk industri sejak awal Agustus. Ketika harga solar untuk industri naik dari Rp 2.400 menjadi Rp 5.400 per liter, minyak tanah langsung langka di pasaran. Kelangkaan tersebut semakin terasa di daerah-daerah tambang batu bara, seperti Kabupaten Tabalong, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut.

Di daerah tambang itu, para sopir truk angkutan batu bara biasa mencampur solar dengan minyak tanah. Jika solar untuk industri harganya Rp 5.400 per liter, maka harga solar yang dioplos dengan minyak tanah berkisar Rp 3.600-Rp 3.800 per liter. Harga minyak tanah sendiri Rp 1.800 per liter.

"Campurannya satu banding enam atau tujuh. Artinya, jika membeli 60 liter solar, minyak tanahnya 10 liter. Pasti akan terasa selisih harganya karena kapasitas tangki truk berkisar 130 liter,

sedangkan yang sudah dimodifikasi bisa menampung 230 liter solar," kata Anwar (42), sopir truk pengangkut batu bara ke Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, dengan upah Rp 35.000 sekali jalan dari Tanah Laut.

Sumba Juga krisis

Warga Pulau Sumba—yang meliputi Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Timur (Nusa Tenggara Timur)—juga didera krisis minyak tanah. Harga minyak tanah di pengecer melambung, yakni Rp 2.500-Rp 3.000 per botol (620 mililiter).

Sejumlah warga Waikabubak di Sumba Barat dan Waingapu di Sumba Timur menuturkan, belum ada tanda-tanda krisis BBM akan pulih. "Kami membeli minyak tanah Rp 2.500 per botol," kata Martina, seorang warga di Waikabubak.

Hal serupa diungkapkan warga lainnya, Petrus Piter. Menurut dia, krisis BBM sudah berlangsung dua bulan. "Saya baru pulang dari beberapa desa, seperti Bukambero, Kalengarongo, Ombakaripit, dan Kori di Kecamatan Kodi Utara, serta desa-desa di Kecamatan Kori. Di sini harganya antara Rp 2.750-Rp 3.000 per botol," tuturnya.

Menurut Petrus, warga biasanya membeli minyak tanah paling banyak dua botol. Minyak tanah itu digunakan untuk lampu, sedangkan untuk masak warga menggunakan kayu bakar.

Di Palembang, antrean warga yang membeli minyak tanah terjadi setiap Selasa dan Kamis. Kedua hari itu merupakan saat agen memasok minyak tanah ke pangkalan atau ke pedagang kecil. Pasokan minyak tanah dikirim rutin dengan harga eceran tertinggi Rp 890 per liter. Namun, menurut Cholil, pedagang minyak tanah di tepi Sungai Musi, pasokan minyak tanah itu tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan selama seminggu.

Cholil mengatakan, kekurangan pasokan tersebut terjadi karena jatah minyak tanah bagi setiap pedagang dikurangi sampai 50 persen. Jatah pada tahun 2004 adalah enam drum (isi 220 liter) per minggu, kini hanya tiga drum per minggu.

Di sejumlah daerah di Solo, Jawa Tengah, selama lima hari terakhir terjadi pembatasan pembelian di pengecer, yakni hanya dua liter setiap pembeli. Untuk mendapatkan minyak tanah bagi industri rumah tangga batik, sejumlah pengusaha kecil terpaksa membeli di daerah lain yang jaraknya hingga empat kilometer.

Suparti (49), seorang pengusaha industri rumah tangga batik di Kampung Bendosari, Laweyan, Solo, mengatakan, dia terpaksa mencari minyak tanah di daerah Mojosongo yang jaraknya sekitar empat kilometer.

Penggunaan energi alternatif lain, seperti kayu atau batu bara yang kini dalam proses pembuatan, menurut dia, tak mungkin dilakukan. Pasalnya, pembuatan batik membutuhkan api yang tidak begitu besar.

Kelangkaan minyak tanah di Solo dan sekitarnya berdampak pada penurunan produksi batik rumahan. Padahal, di Kecamatan Laweyan, misalnya, terdapat puluhan industri batik rumahan.

Wira Penjualan Bahan Bakar Minyak Depo Pertamina Surakarta Tengku Irsah menyatakan, pasokan minyak tanah di wilayah Surakarta sebenarnya berjalan normal. Kelangkaan di sejumlah titik dimungkinkan karena pada 17 Agustus lalu Pertamina libur.

Di seluruh wilayah eks Karesidenan Surakarta terjadi kelangkaan minyak tanah akibat kurangnya pasokan dan kebijakan baru yang menetapkan penyaluran minyak tanah pada hari libur nasional ditiadakan.

"Kelangkaan ini dirasakan di seluruh wilayah eks-Karesidenan Surakarta, bahkan sepertinya juga di seluruh Indonesia," kata Ketua DPC, Hiswana Migas Surakarta FJ August Pramono.

Tunggu satu pekan

Penduduk di beberapa tempat di Banyumas, terlebih warga di daerah pinggiran, terus dihadapkan pada kesulitan mendapatkan minyak tanah. Warga harus me-

nunggu satu pekan untuk memperoleh lima liter atau paling banyak 10 liter minyak tanah yang hanya dipasok seminggu sekali.

Sejumlah penduduk Desa Limpakuwus, Banteran, Banjarsari, Kecamatan Sumbang, kemarin siang turun ke Kota Purwokerto untuk membeli minyak tanah. "Saya sudah berputar-putar ke beberapa tempat, tetapi sampai beberapa jam tidak menemukan pangkalan yang punya stok minyak tanah. Baru sekitar pukul 14.00 menemukan sebuah pangkalan yang mendapat pasokan dari truk tangki BBM," ujar Suprpto, warga Desa Banjarsari.

Kelangkaan minyak tanah di berbagai tempat yang sudah berlangsung beberapa minggu disebabkan meningkatnya konsumsi minyak tanah pascakenaikan harga elpiji. "Di sini elpiji yang mestinya Rp 52.000 (isi 12 kg) dijual Rp 64.000. Jadi, penjualnya yang menaikkan sesuka hati," kata beberapa ibu rumah tangga.

Di Makassar, General Manager PT Pertamina Unit Pemasaran VII RA Syafrudin Wiradikusumah mengatakan, pasokan minyak tanah untuk wilayah Sulawesi cukup aman. Berdasarkan pantauan di sejumlah agen minyak tanah di Makassar tidak tampak antrean. Namun, beberapa pembeli mengatakan, mereka tidak boleh membeli minyak tanah lebih dari lima liter.

Hiswana Migas membantah terjadi kelangkaan minyak. Distribusi minyak tanah untuk wi-

layah eks Karesidenan Banyumas tidak pernah terlambat dan kuantanya juga tidak berkurang.

Berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah di beberapa tempat, Didi Rudwianto, Asisten Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyumas, mengatakan, pihak pemerintah kabupaten telah meminta tambahan kuota kepada Gubernur Jawa Tengah. Saat ini Kabupaten Banyumas memperoleh kuota 187 ton, sedangkan kebutuhan diperkirakan 220 ton per hari.

Indikasi penyelewengan

Menanggapi kelangkaan minyak tanah di sejumlah daerah, juru bicara Pertamina Muhammad Harun kemarin mengatakan, ada indikasi penyelewengan distribusi minyak tanah. "Sejauh pantauan kami, tidak ada pengurangan kuota, hanya pengendalian biasa, yaitu penjatahan 3,75 liter per jiwa per bulan. Jadi, ada kemungkinan jatah minyak tanah untuk masyarakat diselewengkan, baik oleh pemilik pangkalan maupun agen," katanya.

Kemungkinan penyelewengan minyak tanah semakin besar karena disparitas harga minyak tanah subsidi dan industri semakin besar sejak Pertamina mematok harga BBM dengan harga minyak di pasar internasional. Harga minyak tanah untuk masyarakat Rp 700 per liter, sedangkan untuk industri Rp 5.490 per liter.

(THY/CAL/REI/WHY/ECA/EKI/IKA/NTS/DOT)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 18

TAHUN 2005

PENGHEMATAN BBM

Industri Impor Sendiri Kebutuhan BBM

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah perusahaan dan industri di Jawa Timur bersiap menyediakan sendiri kebutuhan bahan bakar minyak. Selain pasokan terjamin, harganya lebih murah dibandingkan dengan Pertamina.

Direktur Utama AKR Corporindo Jimmy Tandyo, Selasa (23/8), mengatakan, perusahaannya bersiap mengimpor *high speed diesel oil* untuk kebutuhan pabrik dan industri skala kecil dan menengah di daerah Jawa Timur mulai awal September.

"Solarnya kami impor dari perusahaan minyak di Singapura. Untuk pengiriman pertama sebanyak 7.000 ton solar melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya," kata Jimmy.

Ditambahkan, harga solar impor bisa lebih murah daripada harga solar industri yang dijual Pertamina yang saat ini mencapai Rp 5.480 per liter.

Direktur PT Tranaco Anton Cahyono mengatakan, dengan mengimpor BBM, para pengusaha terhindar dari ketidakpastian pasokan solar Pertamina. "Sejak harga minyak makin tinggi, industri makin sulit dapat solar. Meskipun sudah mengajukan DO (*delivery order*) dan membayar di muka, pasokan tidak lancar," kata Anton.

Padahal, untuk menjamin kelancaran produksi, perusahaan membutuhkan kepastian pasokan bahan bakar. Direktur Jenderal Badan Pembina Minyak dan Gas (BP Migas) Eri Sudarmo mengatakan, mengacu pada Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, per tanggal 23 November 2005, memang terbuka

RENCANA IMPOR SOLAR

◆ AKR Corporindo mengimpor sebanyak 7.000 ton. Tranaco impor sebanyak 100.000 barrel.

◆ Harga jual BBM Pertamina untuk industri:

- Minyak solar Rp 5.480 per liter.
- Minyak diesel Rp 5.240 per liter.
- Kebutuhan BBM industri sebesar 11,37 juta kiloliter.

kesempatan bagi perusahaan di luar Pertamina untuk terjun di sektor hilir.

"Upaya industri yang membeli sendiri BBM mereka sangat membantu di tengah kondisi Pertamina yang kesulitan memenuhi kebutuhan BBM untuk industri," kata Eri.

Sementara itu, untuk penghematan BBM, Departemen Perhubungan mulai mengurangi jadwal perjalanan kapal penyeberangan. "Pengurangan perjalanan kapal ini sekaligus untuk mengoptimalkan kapal penyeberangan yang saat ini kapasitas penumpangnya sedang sepi," kata Direktur Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Ahmad Syukri di Jakarta.

Dijelaskan, meski perjalanan kapal dikurangi, aktivitas penyeberangan tetap terjadwal sehingga tidak akan terjadi stagnasi penumpang. Ahmad Syukri menyebutkan, pengurangan perjalanan

kapal penyeberangan dimulai di rute Pelabuhan Merak-Bakauheuni dari 80 trip menjadi sekitar 60 trip. Dengan pengurangan trip, penghematan BBM yang bisa dilakukan mencapai 20 persen.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Lutfi Syarif mengatakan, pengurangan trip tersebut sangat positif bagi upaya penghematan BBM.

"Sebab, kalau kami dipaksa menjalankan semua kapal, justru akan rugi. Selain karena harga BBM yang mahal, jumlah penumpang yang diangkut pun sedikit," ujarnya. (DOT/OTW)

55

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH FORUM <input type="checkbox"/> MAJALAH PILARS <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 1												TAHUN 2005																		

Subsidi dan Matematika Aburizal Bakrie

● Subsidi minyak hanya 18% dari pengeluaran pemerintah pusat. ● Subsidi langsung masih meragukan

ANALISIS
Oleh Farid Gaban
Kantor Berita Pena Indonesia

Menteri Koordinator Per-ekonomian Aburizal Bakrie mengatakan, seperti dikutip Antara, bahwa penghapusan subsidi bahan bakar minyak akan menghemat 50% keuangan negara. Pernyataan ini agak membingungkan. Terutama jika dia berbicara tentang rancangan anggaran yang baru saja diajukan pemerintah.

Dalam beberapa hari terakhir ini, Menteri Aburizal Bakrie memanfaatkan momentum jatuhnya mata uang rupiah dan membesarnya defisit anggaran untuk menjustifikasi pencabutan subsidi minyak. Mengurangi subsidi bahan bakar minyak akan memperkuat rupiah, katanya seperti dikutip Bloomberg kemarin.

Rupiah jatuh nilainya sekitar 8,1% tahun ini, membuatnya menjadi mata uang paling melemah di Asia-Pasifik.

"Naiknya jumlah subsidi," menurut Bakrie, "telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah anggaran kita bi-

sa mendukungnya (sehingga rupiah jatuh). "Pemerintah secara serius tengah memikirkan metode subsidi."

Secara lebih spesifik Bakrie menyalahkan subsidi sebagai penyebab jatuhnya mata uang rupiah. "Mata uang rupiah jatuh karena (adanya persepsi) pemerintah harus membeli dolar untuk membayar Pertamina yang menyalurkan subsidi minyak itu," kata Bakrie pada 19 Agustus kemarin.

Menurut Bakrie, subsidi minyak yang diberikan negara tahun 2005 ini diperkirakan Rp 120 triliun, dengan asumsi harga minyak mentah di pasar internasional sebesar US\$ 66 per barel. Subsidi itu, tambahnya, menciptakan defisit anggaran Rp 20 triliun.

Bedasarkan APBN Perubahan 2005, yang diluncurkan 28 Juni lalu, pemerintah harus mengeluarkan Rp 76,5 triliun untuk menjaga agar harga bensin, solar dan minyak tanah tidak naik.

Yang kini menjadi pertanyaan, apakah pemerintah tetap menganggarkan subsidi seperti pada 2005, atau menghapus semua subsidi?

Melihat rancangan ang-

garan negara 2006 yang pekan lalu diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angka subsidi minyak tetap dipatok pada Rp 68,5 triliun, hampir sama dengan tahun ini. Jika harga minyak tetap seperti sekarang (US\$ 65 per



Aburizal Bakrie

barrel), maka pemerintah sebenarnya sudah pasti akan memangkas subsidi menjadi separohnya. Meski Presiden Yudhoyono tidak menyebutkan sepeatah kata pun tentang kemungkinan naiknya harga bensin, solar dan minyak tanah, semua komoditas strategis itu hampir pasti naik.

Jika menjadi nyata, kenaikan harga bensin dan minyak ini merupakan yang kedua setelah Maret lalu Presiden Yudhoyono melakukan hal serupa, dan menjadi isu yang sensitif secara politik.

Namun, jika kata-kata

Bakrie bisa dipegang, subsidi akan dihapus seluruhnya. Dia mengatakan "pemerintah akan tetap menaikkan harga bahan bakar minyak sesuai dengan harga minyak internasional". Artinya, bukankah pemerintah punya surplus baru senilai Rp 120 triliun. Akan dikemanakan uang ini?

Bakrie mengatakan akan memindahkan subsidi minyak itu menjadi subsidi langsung. Tapi total subsidi langsung itu hanya sebesar Rp 47 triliun (dengan rincian: Rp 33 triliun untuk pendidikan, Rp 14 triliun untuk kesehatan).

Dan subsidi langsung ini pun belum akan bisa diterima masyarakat miskin, yang jumlahnya sudah dipastikan makin besar dengan naiknya harga-harga sekarang.

Jumlah orang miskin menurut data BPS sekitar 37 juta orang. Namun, data UNDP mengatakan bahwa sekitar separoh penduduk Indonesia (artinya 100 juta) berada di sekitar garis kemiskinan, sehingga sejumlah itu pula besar kemungkinan jatuh miskin jika harga-harga kebutuhan pokok naik.

Penyaluran subsidi langsung ini masih mengandung

58

soal. BPS bahkan baru saja mulai membuat sensus untuk menghitung secara lebih benar jumlah orang miskin, beserta alamatnya. Entah kapan sensus ini akan selesai, sementara harga-harga sudah terburu naik jika pemerintah menghapus lagi subsidi.

Masyarakat miskin akan makin terpukul oleh kemungkinan ini, belum lagi oleh dampak jatuhnya rupiah sendiri. Ini membawa renungan yang lebih mendalam: benarkah subsidi memang biang keladi bangkrutnya negara, membesarnya defisit dan jatuhnya rupiah, sehingga prioritas untuk dihapuskan?

Pos subsidi minyak yang dianggarkan pada 2006 hanya 18% dari total belanja pemerintah pusat. Nilai subsidi itu tidak signifikan akan mengubah "keuangan negara" jika pun dihapus. Pengeluaran terbesar pemerintah pusat masih untuk membayar utang, yakni sebesar Rp 164,3 triliun (43,8%). Cicilan bunga utang saja sedikit lebih banyak dari subsidi minyak.

Tidakkah pemerintah lebih suka membebani kesulitan kepada rakyatnya ketimbang menegosiasi utang?

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2005

Harga Emas Naik Lagi

Pedagang dan Pembeli Masih Bersikap Hati-hati

JAKARTA, KOMPAS — Harga emas internasional di Bursa New York pada Jumat (19/8) baru mencapai 436,8 dollar AS per *troy ounce*, Senin (22/8) menjadi 439,5 dollar AS per *troy ounce*. Dampak dari kenaikan itu mengakibatkan harga jual emas di dalam negeri naik selitan Rp 12.000 menjadi Rp 142.000 per gram.

Faktor utama penyebab kenaikan itu adalah melonjaknya harga minyak dunia dan melemahnya rupiah hingga menembus Rp 10.000 per dollar AS. Pengamatan di sejumlah toko emas di Ibu Kota dan sekitarnya, Selasa kemarin, perdagangan emas terlihat lesu.

Umumnya, para pembeli maupun penjual bersikap hati-hati berkaitan dengan fluktuasi harga jual emas. Seorang ibu yang ditemui di toko emas di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, mengatakan, biar kelihatan cantik dirinya tetap ingin mengenakan perhiasan emas. Namun, di sisi lain dirinya juga membutuhkan biaya untuk keluarganya sehingga sebagian perhiasan itu terpaksa dijual lagi.

Di Pasar Blok A, misalnya, beberapa konsumen terlihat menjual perhiasannya dengan alasan untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Kalaupun ingin membeli perhiasan emas, mereka lebih memilih untuk melakukan tukar tambah.

Ny Mila (30), warga Kebayoran Lama, menuturkan, kalau kalung emas ini enggak dijual, bagaimana bisa memberi makan anaknya. "Paling enggak, sebagian uang itu habis dipakai untuk membayar uang sekolah," katanya.

Menurut Fajar, pedagang emas di Pasar Blok A, harga emas terus menerus mengalami perubahan. Sejak gonjang-ganjing

harga minyak, lalu nilai tukar rupiah semakin melemah, harga emas makin sulit ditentukan.

"Sebelum nilai tukar mencapai di atas Rp 10.000 per dollar, harga emas masih berkisar Rp 130.000 per gram. Itu pun sudah termasuk ongkos pembuatannya," kata Fajar.

Hal itu pun diakui Maulana, pemilik toko mas Mustika. Dia mengeluhkan daya beli masyarakat yang semakin menurun. Bahkan, penurunannya mencapai sekitar 30 persen.

Cenderung meningkat

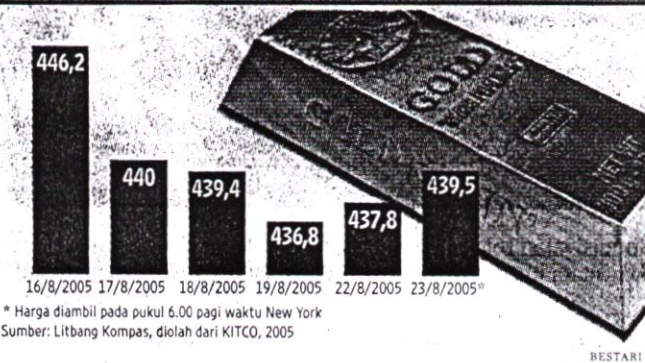
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia (Apepi) Jeffrey Thumewa mengatakan, fluktuasi harga emas akibat berbagai faktor, yakni faktor harga minyak dan kondisi politik dunia.

Dari Bursa Perdagangan New York, harga emas mulai meningkat sejak 19 Agustus lalu yang mencapai 436,8 dollar AS per *troy ounce*. Selanjutnya, harga emas menjadi 437,8 dollar AS dan meningkat lagi menjadi 439,5 dollar AS per *troy ounce*.

Jika diperhitungkan harga emas dalam negeri, berat satu *troy ounce* sama dengan 31,1 gram. Apabila dalam kurs Rp 10.000 per dollar AS, harga emas mencapai Rp 142.000 per gram.

Di Hongkong, harga emas pada pembukaan Selasa kemarin dilaporkan mencapai 438,6 dollar

Harga Emas Bursa New York (Dalam Dollar AS per Troy Ounce)



* Harga diambil pada pukul 6.00 pagi waktu New York
Sumber: Litbang Kompas, diolah dari KITCO, 2005

AS per *troy ounce*. Kemudian, ditutup pada posisi 440,1 dollar AS per *troy ounce*.

Jeffrey mengatakan, saat ini para spekulasi makin sering "bermain" emas untuk modal investasi. Kondisi rupiah yang terus melemah ini bisa mengakibatkan

pedagang melebur emasnya untuk diekspor dalam bentuk logam mulia. Untuk membangkitkan daya beli emas dalam negeri, Apepi menilai penciptaan situasi yang kondusif sangatlah menentukan sehingga masyarakat tidak mudah panik. (OSA/AFP)